

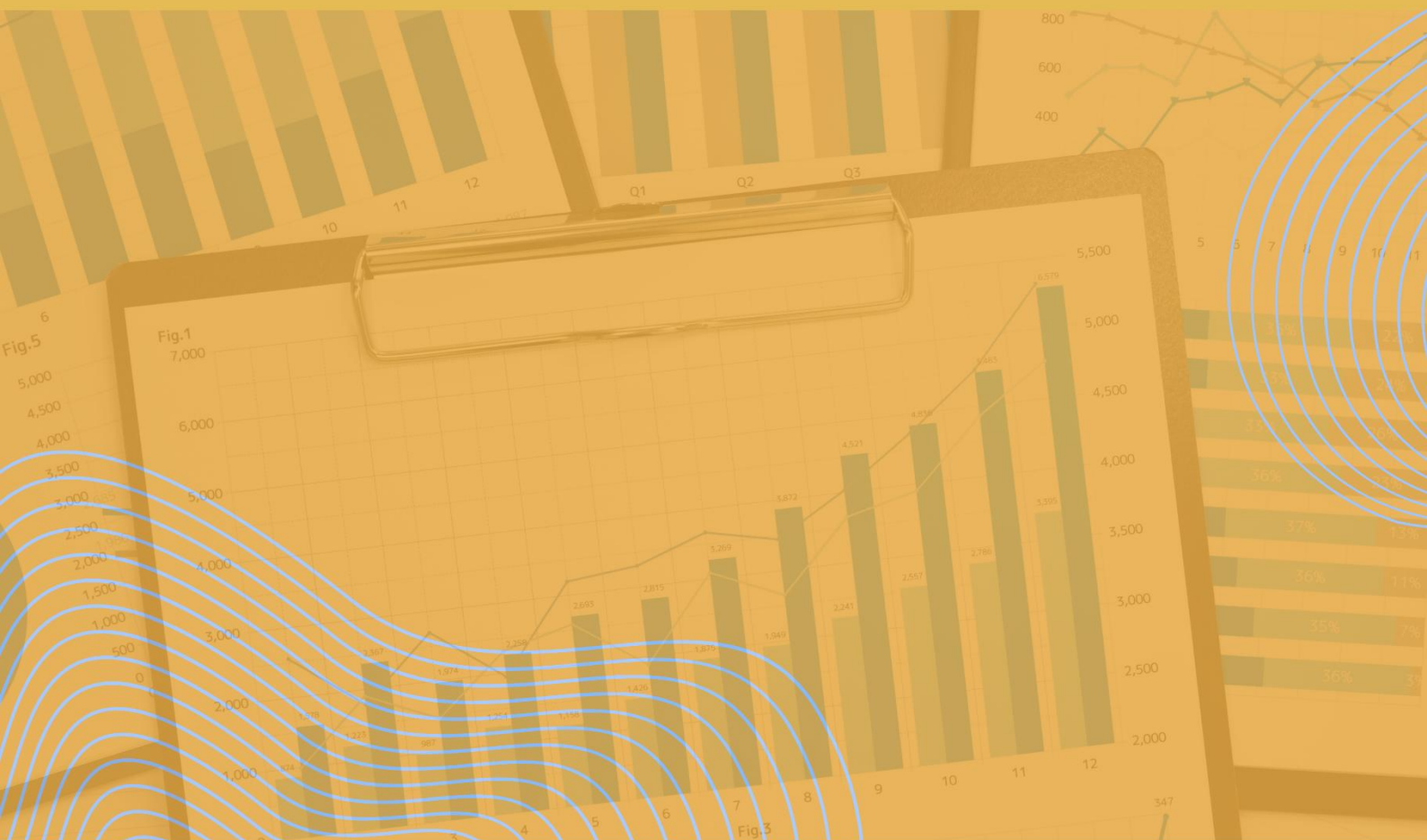


**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BONTANG**

LAPORAN KEUANGAN

**Badan Pusat Statistik
Kota Bontang**

TAHUNAN UNAUDITED T.A. 2025



JL. AWANG LONG NO. 2 KEL. BONTANG BARU, KEC. BONTANG UTARA, KOTA BONTANG

TELP: (0548) 26066 | FAX: (0548) 27706

WEBSITE: [HTTPS://BONTANGKOTA.BPS.GO.ID](https://bontangkota.bps.go.id) | EMAIL: BPS6474@BPS.GO.ID

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPS Kota Bontang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Bontang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPS Kota Bontang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bontang, 09 Februari 2026
Kepala,

Ir. Nur Wahid M.M.
NIP.196905241993021001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Indeks Singkatan	vii
I. Ringkasan	1
II. Laporaan Realisasi Anggaran	3
III. Neraca	4
IV. Laporan Operasional	6
V. Laporan Perubahan Ekuitas	7
VI. Catatan Atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1 Profil Dan Kebijakan Teknis	8
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	11
A.3 Basis Akuntansi	11
A.4 Dasar Pengukuran	11
A.5 Kebijakan Akuntansi	12
B Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	22
B.2 Belanja Negara	26
B.3 Belanja Pegawai	31
B.4 Belanja Barang	33
B.5 Belanja Modal	35
B.5.1 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	36
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	37
C.1 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	37
C.2 Persediaan	37
C.3 Tanah	41
C.4 Peralatan Dan Mesin	41
C.5 Gedung Dan Bangunan	45
C.6 Aset Tetap Lainnya	45
C.7 Akumulasi Penyusutan	47
C.8 Aset Tak Berwujud	47
C.9 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	48
C.10 Aset Lain-lain	50
C.11 Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	52
C.12 Utang Kepada Pihak Ketiga	53
C.13 Ekuitas	55

D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	56
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	56
D.2 Beban Pegawai	57
D.3 Beban Persediaan	60
D.4 Beban Barang Dan Jasa	60
D.5 Beban Pemeliharaan	65
D.6 Beban Perjalanan Dinas	66
D.7 Beban Penyusutan Dan Amortisasi	67
D.8 Kegiatan Non Operasional	68
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	69
E.1 Ekuitas Awal	69
E.2 Surplus/defisit-lo	69
E.3 Koreksi Menambah/mengurangi Nilai Ekuitas	69
E.3.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	70
E.4 Transaksi Antar Entitas	71
E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (ddel)/ditagihkan Ke Entitas Lain (dkel)	72
E.4.2 Transfer Masuk/transfer Keluar	73
E.5 Ekuitas Akhir	75
F. Pengungkapan Lainnya	76

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian Tabel	Halaman
Tabel 1	Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	13
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	15
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	16
Tabel 4	Rincian Anggaran	18
Tabel 4A	Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Program	19
Tabel 4B	Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Sumber Dana	20
Tabel 5	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	23
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Pendapatan	24
Tabel 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	26
Tabel 7A	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program per 31 Desember 2025	27
Tabel 7B	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana per 31 Desember 2025	28
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Belanja	30
Tabel 9	Perbandingan Belanja Pegawai	31
Tabel 10	Perbandingan Belanja Barang	33
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	35
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36
Tabel 13	Rincian Belanja Dibayar di Muka	37
Tabel 14	Rincian Persediaan	38
Tabel 14A	Rincian Perubahan (Koreksi) Pembukuan BMN per 31 Desember 2025	43
Tabel 14B	Rincian aset tetap lainnya yang mengalami penghentian aset dari penggunaan per 31 Desember 2025	46
Tabel 15	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	47
Tabel 16	Rincian Aset Tak berwujud	48
Tabel 16A	Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	49
Tabel 16B	Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025	49
Tabel 16C	Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025	49
Tabel 16D	Rincian aset lain-lain per 31 Desember 2025	51
Tabel 17	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	52
Tabel 17A	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	53
Tabel 18	Rincian Utang Pada Pihak Ketiga	54
Tabel 19	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	56

Tabel 20	Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak	57
Tabel 21	Rincian Beban Pegawai	57
Tabel 22	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai	59
Tabel 23	Rincian Beban Persediaan	60
Tabel 24	Rincian Beban Barang dan Jasa	61
Tabel 25	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa	63
Tabel 26	Rincian Beban Pemeliharaan	65
Tabel 27	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan	65
Tabel 28	Rincian Beban Perjalanan Dinas	66
Tabel 29	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas	67
Tabel 30	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	67
Tabel 31	Rincian Kegiatan Non Operasional	68
Tabel 32	Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	70
Tabel 33	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	71
Tabel 34	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	71
Tabel 34A	Rincian Diterima dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2025	73
Tabel 35	Rincian Transfer Masuk	74

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPS Kota Bontang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bontang, 09 Februari 2026
Kepala,

Ir. Nur Wahid M.M.
NIP.196905241993021001



INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis

I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan BPS Kota Bontang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp51.897.123 atau mencapai 2.700,16 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.922.000.

Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.686.813.761 atau mencapai 97,71 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.819.902.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Neraca yang disajikan adalah hasil proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.816.387.014 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp15.862.574 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.691.854.546 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp108.669.894.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp141.245.359 dan Rp4.675.141.655.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.412.164,

sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp5.806.911.607 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp5.803.499.443. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp46.763.007 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp5.756.736.436.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp4.736.833.782 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp5.756.736.436 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp598.772 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.694.445.537 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp4.675.141.655.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPS Kota Bontang
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025		% terhadap Anggaran	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.922.000	51.897.123	2.700,16	1.921.652
JUMLAH PENDAPATAN		1.922.000	51.897.123	2.700,16	1.921.652
Belanja Negara	B.2	5.819.902.000	5.686.813.761	97,71	4.892.697.247
Belanja Pegawai	B.3	3.235.000.000	3.194.685.669	98,75	2.991.647.263
Belanja Barang	B.4	2.308.862.000	2.216.531.445	96,00	1.805.049.984
Belanja Modal	B.5	276.040.000	275.596.647	99,84	96.000.000
JUMLAH BELANJA		5.819.902.000	5.686.813.761	97,71	4.892.697.247

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. NERACA

BPS Kota Bontang
NERACA
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	998.314	12.379.563
Persediaan	C.2	14.864.260	51.621.251
Jumlah Aset Lancar		15.862.574	64.000.814
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.3	1.504.778.000	1.504.778.000
Peralatan Dan Mesin	C.4	2.523.842.667	2.235.895.972
Gedung Dan Bangunan	C.5	2.874.089.197	2.874.089.197
Aset Tetap Lainnya	C.6	10.669.400	102.281.121
Akumulasi Penyusutan	C.7	(2.221.524.718)	(1.933.513.704)
Jumlah Aset Tetap		4.691.854.546	4.783.530.586
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	25.700.000	25.700.000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.9	17.058.173	27.583.170
Aset Lain-lain	C.10	289.070.220	197.458.499
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.11	(223.158.499)	(223.158.499)
Jumlah Aset Lainnya		108.669.894	27.583.170
JUMLAH ASET		4.816.387.014	4.875.114.570
KEWAJIBAN			

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	141.245.359	138.280.788
JUMLAH KEWAJIBAN		141.245.359	138.280.788
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	4.675.141.655	4.736.833.782
JUMLAH EKUITAS		4.675.141.655	4.736.833.782
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.816.387.014	4.875.114.570

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN OPERASIONAL

BPS Kota Bontang LAPORAN OPERASIONAL Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	3.412.164	1.921.652
JUMLAH PENDAPATAN		3.412.164	1.921.652
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.205.815.611	2.999.680.269
Beban Persediaan	D.3	118.101.608	164.669.839
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.539.133.045	1.171.617.843
Beban Pemeliharaan	D.5	227.152.708	71.101.972
Beban Perjalanan Dinas	D.6	428.098.849	472.120.732
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	288.609.786	316.445.363
JUMLAH BEBAN		5.806.911.607	5.195.636.018
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.803.499.443)	(5.193.714.366)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	38.434.000	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8.329.007	1.280.000
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		46.763.007	1.280.000
SURPLUS/DEFISIT		(5.756.736.436)	(5.192.434.366)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPS Kota Bontang LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas awal	E.1	4.736.833.782	4.972.554.364
Surplus/defisit-LO	E.2	(5.756.736.436)	(5.192.434.366)
Koreksi menambah/mengurangi nilai ekuitas	E.3	598.772	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.1	598.772	0
Transaksi Antar Entitas	E.4	5.694.445.537	4.956.713.784
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	5.634.916.638	4.890.775.595
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.4.2	59.528.899	65.938.189
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(61.692.127)	(235.720.582)
Ekuitas Akhir	E.5	4.675.141.655	4.736.833.782

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

Entitas dan Rencana Strategis	A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPS Kota Bontang Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.
-------------------------------	---

Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:
Visi BPS :

"Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

("An independent and credible institution that actively contributes to supporting data-driven policy formulation in advancing Indonesia toward the Golden Indonesia 2045")

Dalam visi yang baru tersebut BPS menetapkan visi yang berlandaskan prinsip independensi, kepercayaan publik, peran aktif, serta dukungan penuh terhadap kebijakan berbasis data. Sebagai lembaga yang menjunjung tinggi objektivitas dan tidak memihak, BPS memastikan seluruh proses statistik berjalan netral dan bebas dari intervensi, sehingga mampu mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal.

Dalam menjaga kepercayaan publik, BPS berkomitmen menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan berkualitas tinggi melalui metode yang terstandar serta proses yang transparan. BPS juga mengambil peran aktif dengan berkolaborasi dan berkontribusi bagi pembangunan nasional, baik melalui penyusunan statistik maupun pendampingan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menghasilkan data yang berkualitas.

Selain itu, BPS menjadi pilar penting dalam mendorong kebijakan berbasis data, memastikan setiap keputusan pemerintah memiliki landasan informasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh upaya ini sejalan dengan visi Presiden untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan data yang kredibel.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS. Selaras dengan arah kebijakan di dalam RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029,

serta Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
2. Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2025-2029, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk :

1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
2. Membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional
3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik
4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

2. Program Dukungan Manajemen BPS (Dukman).

Program generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :

1. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
2. Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi

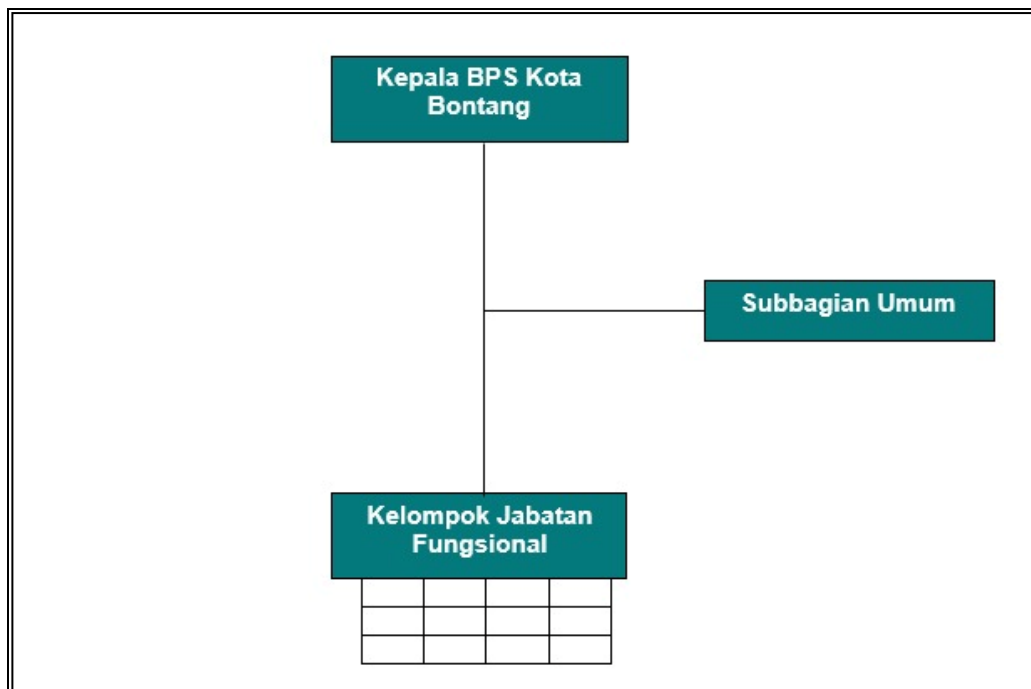
- kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
3. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah;
 4. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK

Badan Pusat Statistik sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi instansi vertikal BPS, dilaksanakan oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI BPS KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2025



Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Pendekatan Penyusunan

Laporan Keuangan Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Kota Bontang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan BPS Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 disusun melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang merupakan sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan untuk berbagai jenjang pelaporan dari tingkat satuan kerja sampai dengan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan keuangan dihasilkan oleh modul-modul yang terdapat pada SAKTI. Laporan keuangan yang menginformasikan tentang pengelolaan keuangan dihasilkan oleh modul penganggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, piutang, dan pelaporan (GLP). Laporan keuangan yang menginformasikan pengelolaan Barang Milik Negara dihasilkan oleh modul persediaan dan aset tetap.

Basis Akuntansi **A.3. Basis Akuntansi**

Basis Akuntansi

BPS Kota Bontang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran **A.4. Dasar Pengukuran**

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Kota Bontang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Kota Bontang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Bontang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Pendapatan- **(1) Pendapatan- LRA**
LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan **(2) Pendapatan- LO**
LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPS Kota Bontang adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan penjualan aset.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban **(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar **a. Aset Lancar**

- Aset disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal Neraca
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*first in first out*).
- Nilai Persediaan disajikan di Neraca berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal Neraca dikalikan dengan
 - biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin serta peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.06/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada tabel 2

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah Aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Lain-lain berupa Aset Tetap yang rusak dan tidak dipergunakan kembali untuk operasional tetapi belum dilakukan penghapusan dan masih tercatat sebagai aset

Kewajiban **(6) Kewajiban**

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS Kota Bontang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Per 31 Desember 2025, anggaran belanja Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 semula Rp5.909.513.000 menjadi Rp5.819.902.000, terdapat penurunan sebesar Rp89.611.000. Penurunan anggaran belanja terjadi pada kelompok Belanja Pegawai dan Belanja Barang, sedangkan pada kelompok Belanja Modal mengalami kenaikan. Anggaran kelompok Belanja Pegawai terdapat penurunan sebesar Rp19.722.000. Penurunan ini diperoleh dari anggaran semula sebesar Rp3.254.722.000 berubah menjadi Rp3.235.000.000. Kelompok Belanja Barang mengalami penurunan anggaran sebesar Rp345.929.000, dari anggaran awal sejumlah Rp2.654.791.000 menjadi Rp2.308.862.000. Sedangkan, kelompok Belanja Modal mengalami penambahan anggaran sebesar Rp276.040.000, dari anggaran awal sejumlah Rp0 menjadi Rp276.040.000.

Estimasi penerimaan pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan sebesar Rp1.922.000. Nilai estimasi penerimaan pendapatan tersebut teralokasi atas estimasi penerimaan pendapatan kelompok akun Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN yang diperoleh dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.

*Tabel 4
Rincian Anggaran*

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.922.000	1.922.000
Pendapatan Lain-Lain	0	0
Jumlah Pendapatan	1.922.000	1.922.000
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	3.254.722.000	3.235.000.000
BELANJA BARANG	2.654.791.000	2.308.862.000
BELANJA MODAL	0	276.040.000
Jumlah Belanja	5.909.513.000	5.819.902.000

Anggaran belanja Tahun Anggaran 2025 dialokasikan berdasarkan kelompok program kegiatan sebanyak 2 kelompok, yaitu kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan Dukungan Manajemen. Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi perubahan anggaran belanja menurut kelompok program. Perubahan ini terdapat pada pagu belanja kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan Dukungan Manajemen. Secara ringkas perubahan pagu belanja menurut kelompok program disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4A
Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Program

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.899.869.000	1.531.788.000
Program Dukungan Manajemen	4.009.644.000	4.288.114.000
Jumlah	5.909.513.000	5.819.902.000

Anggaran belanja kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp368.081.000 dari anggaran semula sebesar Rp1.899.869.000 menjadi sebesar Rp1.531.788.000. Sedangkan anggaran belanja kelompok program Dukungan Manajemen mengalami peningkatan sebesar Rp278.470.000 dari anggaran semula sebesar Rp4.009.644.000 menjadi sebesar Rp4.288.114.000. Atas perubahan anggaran belanja pada program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan Dukungan Manajemen, secara keseluruhan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp89.611.000.

Selain dikelompokkan berdasarkan program, anggaran belanja selama Tahun Anggaran 2025 juga dikelompokkan berdasarkan sumber dana. Kelompok pagu belanja menurut sumber dana yang diterima terbagi menjadi 3 (tiga) jenis sumber dana, yaitu kelompok sumber dana Rupiah Murni (RM), PNBPN, dan Hibah Langsung Luar Negeri. Sumber dana untuk anggaran belanja di Badan Pusat Statistik Kota Bontang berasal dari Rupiah Murni (RM). Anggaran belanja Tahun Anggaran 2025 dari kelompok sumber dana Rupiah Murni mengalami penurunan sebesar Rp89.611.000 dari anggaran semula sebesar Rp5.909.513.000 menjadi Rp5.819.902.000 sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 4B
Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Sumber Dana

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Rupiah Murni (RM)	5.909.513.000	5.819.902.000
PNBP	0	0
Hibah	0	0
Jumlah	5.909.513.000	5.819.902.000

DIPA Awal BPS Kota Bontang dengan Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan nomor Digital Stamp (DS): 1426-4569-9116-9220 dengan total nilai pagu anggaran Rp5.909.513.000 (lima miliar sembilan ratus sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah). Per 31 Desember 2025, BPS Kota Bontang telah melakukan 10 (sepuluh) kali revisi anggaran sebagai berikut:

- a. Revisi ke-1 dilakukan dalam rangka Efisiensi Anggaran BPS TA. 2025 sesuai Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-76/02000/PR.400/2025 tanggal 4 Februari 2025 menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan No:S-37/MK.02/2025 Tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2025 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2025 tanggal 21 Februari 2025 dengan nomor Digital Stamp (DS): 8723-1413-9100-4944. Total nilai pagu anggaran hasil revisi berubah menjadi Rp5.895.687.000 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- b. Revisi ke-2 dilakukan dalam rangka revisi DIPA Triwulan I TA 2025 sesuai Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-115/02000/PR.440/2025 tanggal 27 Februari 2025. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2025 Nomor: SP DIPA- 054.01.2.637237/2025 tanggal 18 Maret 2025 dengan nomor Digital Stamp (DS): 0982-6885-4706-0897. Total nilai pagu anggaran hasil revisi berubah menjadi Rp5.896.422.000 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- c. Revisi ke-3 dilakukan dalam rangka Revisi Halaman III DIPA. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2025 Nomor: SP DIPA- 054.01.2.637237/2025 tanggal 16 April 2025 dengan nomor Digital Stamp (DS): 0982-6885-4706-0897. Total nilai pagu anggaran hasil revisi tetap

yaitu Rp5.896.422.000 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- d. Revisi ke-4 dilakukan dalam rangka Revisi DIPA Triwulan II TA 2025 sesuai Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-180/02000/PR.440/2025 tanggal 15 April 2025. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2025 Nomor: SP DIPA- 054.01.2.637237/2025 tanggal 30 April 2025 dengan nomor Digital Stamp (DS): 9420-0902-8906-1770. Total nilai pagu anggaran hasil revisi berubah menjadi Rp5.901.422.000 (lima miliar sembilan ratus satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- e. Revisi ke-5 dilakukan dalam rangka Relaksasi Efisiensi Anggaran BPS TA 2025 sesuai Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-297/02000/PR.400/2025 tanggal 10 Juni 2025 perihal Tindak Lanjut Usulan Relaksasi Efisiensi Anggaran BPS TA 2025 Melalui Aplikasi SAKTI serta surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-168/01000/PR.400/2025 dan B-243/01000/PR.400/2025 terkait dengan usulan relaksasi efisiensi anggaran BPS TA 2025 kepada Menteri Keuangan. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2025 Nomor: SP DIPA- 054.01.2.637237/2025 tanggal 23 Juni 2025 dengan nomor Digital Stamp (DS): 0046-2749-0648-0181. Total nilai pagu anggaran hasil revisi berubah menjadi Rp6.324.869.000 (enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- f. Revisi ke-6 dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan BPS tahun 2025 sesuai Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-302/02100/PR.440/2025 tanggal 2 Juli 2025 perihal Revisi DIPA Triwulan III TA 2025. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2025 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2025 tanggal 16 Juli 2025 dengan nomor Digital Stamp (DS): 3307-3065-3575-0366. Total nilai pagu anggaran hasil revisi berubah menjadi Rp5.833.055.000 (lima miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah).
- g. Revisi ke-7 dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan BPS tahun 2025 sesuai Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-506/02000/PR.440/2025 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Revisi DIPA Agustus TA 2025. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2025 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2025 tanggal 4 September 2025 dengan nomor Digital Stamp (DS): 9241-1248-5640-8865. Total nilai pagu anggaran hasil revisi berubah menjadi Rp5.903.786.000 (lima miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- h. Revisi ke-8 dilakukan dalam rangka Revisi Halaman III DIPA. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2025 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dengan nomor Digital Stamp (DS): 9241-1248-5640-8865. Total nilai pagu anggaran hasil revisi tetap yaitu Rp5.903.786.000 (lima miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - i. Revisi ke-9 dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan BPS tahun 2025 sesuai Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-621/02000/PR.440/2025 tanggal 13 Oktober 2025 perihal Revisi DIPA Oktober TA 2025. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2025 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2025 tanggal 3 November 2025 dengan nomor Digital Stamp (DS): 2501-1398-9002-5054. Total nilai pagu anggaran hasil revisi berubah menjadi Rp5.819.902,000 (lima miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua ribu).
10. Revisi ke-10 dilakukan dalam rangka Revisi Pemutakhiran Data POK. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2025 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2025 tanggal 11 Desember 2025 dengan nomor Digital Stamp (DS): 2501-1398-9002-5054. Total nilai pagu anggaran hasil revisi tetap yaitu Rp5.819.902,000 (lima miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua ribu).

Rincian setiap Revisi DIPA dijelaskan pada Penjelasan Lainnya.

Adapun pengurangan anggaran selama Tahun Anggaran 2025 ini berpengaruh terhadap pencapaian realisasi anggaran dan sasaran capaian kinerja yang ditargetkan sampai dengan 31 Desember 2025 karena satker perlu meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

Realisasi PNB **B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak**
Rp51.897.123

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp51.897.123 atau mencapai 2.700,16 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.922.000. Rincian Pendapatan BPS Kota Bontang sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.922.000	41.846.164	2.177,22
Pendapatan Lain-Lain	0	10.050.959	0,00
Jumlah	1.922.000	51.897.123	0

Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN terdiri atas Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp3.412.164 berupa sewa rumah dinas terhitung 12 bulan per 31 Desember 2025 dan dirinci sebagaimana berikut:

- a. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Januari 2025 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Januari 2025 No. 00001A tanggal 1 Januari 2025;
- b. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Februari 2025 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Februari 2025 No. 00008A tanggal 8 Januari 2025;
- c. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Maret 2025 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Maret 2025 No. 00016A tanggal 10 Februari 2025;
- d. Pendapatan sewa rumah dinas bulan April 2025 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk April 2025 No. 00053A tanggal 4 Maret 2025;
- e. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Mei 2025 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Mei 2025 No. 00091A tanggal 9 April 2025;
- f. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Juni 2025 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Juni 2025 No. 00123A tanggal 6 Mei 2025.
- g. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Juli 2025 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Juli 2025 No. 00158A tanggal 3 Juni 2025.
- h. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Agustus 2025 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Agustus 2025 No. 00212A tanggal 11 Juli 2025.

- i. Pendapatan sewa rumah dinas bulan September 2025 sebesar Rp284.347 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk September 2025 No. 00267A tanggal 7 Agustus 2025.
10. Pembayaran kekurangan pendapatan sewa rumah dinas bulan Januari–Agustus 2025 yang disetor melalui SIMPONI dengan NTB 901341072130 dan NTPN 82B6C0NA0E3DAN16 tanggal 21 Agustus 2025 sebesar Rp993.680.
11. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Oktober 2025 sebesar Rp284.347 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Oktober 2025 No. 00352A tanggal 10 September 2025.
12. Pendapatan sewa rumah dinas bulan November 2025 sebesar Rp284.347 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk November 2025 No. 00379A tanggal 2 Oktober 2025.
13. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Desember 2025 sebesar Rp284.347 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Desember 2025 No. 00474A tanggal 11 November 2025.

Berdasarkan Kepka BPS Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tarif Sewa Rumah Negara Golongan I Badan Pusat Statistik di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tarif sewa rumah negara golongan I untuk rumah dinas yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika Kota Bontang adalah sebesar Rp284.347 per bulan.

Sementara, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp38.434.000 diperoleh dari hasil lelang BMN BPS Kota Bontang sesuai Risalah Lelang Nomor 82/13.04/2025-01 tanggal 6 Oktober 2025. PNPB tersebut disetor melalui SIMPONI dengan NTB Nomor 827842563758 dan NTPN Nomor 8C08155DFJ525I57 pada tanggal 13 Oktober 2025.

Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp10.050.959 yang diperoleh dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025(Rp)	Realisasi 31 Desember 2024(Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	41.846.164	1.921.652	2.077,61
Pendapatan Lain-Lain	10.050.959	0	0,00
Jumlah	51.897.123	1.921.652	2.600,65

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 2.600,65 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2024.

Peningkatan realisasi pendapatan per 31 Desember 2025 dibanding per 31 Desember 2024 disumbangkan oleh meningkatnya Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN serta Pendapatan Lain-Lain.

Peningkatan Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar 2.077,61 persen disebabkan oleh adanya peningkatan tarif sewa rumah negara per 1 Januari 2025 dan adanya pendapatan dari hasil lelang BMN BPS Kota Bontang selama Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Kepka BPS Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tarif Sewa Rumah Negara Golongan I Badan Pusat Statistik di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tarif sewa rumah negara golongan I untuk rumah dinas yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika Kota Bontang adalah sebesar Rp284.347 per bulan. Sehingga, per 31 Desember 2025 diperoleh Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN berupa Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi untuk 12 bulan dari Januari–Desember 2025 sebesar Rp3.412.164.

Sementara, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp38.434.000 diperoleh dari hasil lelang BMN BPS Kota Bontang sesuai Risalah Lelang Nomor 82/13.04/2025-01 tanggal 6 Oktober 2025. PNPB tersebut disetor melalui SIMPONI dengan NTB Nomor 827842563758 dan NTPN Nomor 8C08155DFJ525157 pada tanggal 13 Oktober 2025. Rincian lelang BMN yang dilaksanakan oleh BPS Kota Bontang selama Tahun Anggaran 2025 akan dijelaskan pada Pengungkapan Lainnya.

Peningkatan realisasi pendapatan per 31 Desember 2025 dibanding per 31 Desember 2024 juga disumbangkan oleh meningkatnya Pendapatan Lain-Lain yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2025. Pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat Pendapatan Lain-Lain. Sedangkan, pada Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Lain-Lain diperoleh dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp8.329.007 dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.721.952. Pendapatan Lain-Lain yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2025 dirangkum sebagai berikut.

- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian kelebihan pembayaran belanja

honor KPA TA 2024 sebesar Rp5.283.600 pada tanggal 2 Mei 2025 dengan NTB 903136072106 dan NTPN 5BD1848VVO3F521I.

- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang Manajemen Building TA 2024 sebesar Rp3.002.450 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 Badan Pemeriksa Keuangan. Pengembalian dilakukan pada tanggal 14 April 2025 dengan NTB 910973091109 dan NTPN 99DE47QLV2AC7SBO.
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian dobel bayar tagihan telekomunikasi bulan Oktober 2024 sebesar Rp42.957 pada tanggal 18 Februari 2025 dengan NTB 282145253710 dan NTPN 6918B0NA0DH8NR34.
- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan administrasi surat kendaraan mobil dinas roda empat TA 2023 sebesar Rp441.952 pada tanggal 19 Februari 2025 dengan NTB 902557075559 dan NTPN 4E11848VVNR0VAQ4.
- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian kelebihan pembayaran belanja IT berupa PC Unit TA 2023 sebesar Rp1.280.000 pada tanggal 14 April 2025 dengan NTB 10782090942 dan NTPN 9FC5A6U8F7NVQS1M.

Realisasi Belanja Negara
Rp5.686.813.761

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.686.813.761 atau 97,71 persen dari anggaran belanja sebesar Rp5.819.902.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025

Uraian	2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	3.235.000.000	3.194.685.669	98,75
BELANJA BARANG	2.308.862.000	2.216.531.445	96,00
BELANJA MODAL	276.040.000	275.596.647	99,84
Jumlah Netto	5.819.902.000	5.686.813.761	97,71

Anggaran dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik Kota Bontang per 31 Desember 2025 menurut kelompok jenis belanja, masing-masing sebesar Rp5.819.902.000 dan Rp5.686.813.761. Komposisi anggaran

dan realisasi belanja yang terbagi menjadi tiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal dari keseluruhan nilai anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut:

1. Komposisi anggaran Belanja Pegawai dari keseluruhan nilai anggaran per jenis belanja adalah 55,59 persen atau senilai Rp3.235.000.000. Komposisi realisasi Belanja Pegawai netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 56,18 persen atau senilai Rp3.194.685.669. Sedangkan persentase realisasi Belanja Pegawai jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Pegawai adalah 98,75 persen.
2. Komposisi anggaran Belanja Barang dari keseluruhan nilai anggaran per jenis belanja adalah 39,67 persen atau senilai Rp2.308.862.000. Komposisi realisasi Belanja Barang netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 38,98 persen atau senilai Rp2.216.531.445. Sedangkan persentase realisasi Belanja Barang jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Barang adalah 96,00 persen.
3. Komposisi anggaran Belanja Modal dari keseluruhan nilai anggaran per jenis belanja adalah 4,74 persen atau senilai Rp276.040.000. Komposisi realisasi Belanja Modal netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 4,85 persen atau senilai Rp275.596.647. Sedangkan persentase realisasi Belanja Modal jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Barang adalah 99,84 persen.

Per 31 Desember 2025, persentase anggaran belanja pegawai merupakan yang terbesar dari keseluruhan nilai anggaran menurut jenis belanja dibandingkan dengan anggaran belanja barang dan belanja modal. Selain itu, persentase realisasi belanja pegawai juga memiliki proporsi yang terbesar dari keseluruhan nilai realisasi menurut jenis belanja selama Tahun Anggaran 2025.

*Tabel 7A
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program
per 31 Desember 2025*

Uraian	2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.531.788.000	1.439.644.603	93,98
Program Dukungan Manajemen	4.288.114.000	4.247.169.158	99,05
Jumlah Netto	5.819.902.000	5.686.813.761	97,71

Anggaran dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik Kota Bontang selama Tahun Anggaran 2025 menurut program, masing-masing sebesar Rp5.819.902.000 dan Rp5.686.813.761. Komposisi anggaran dan realisasi belanja yang terbagi menjadi dua jenis program yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan Program Dukungan Manajemen dari keseluruhan nilai anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut:

1. Komposisi anggaran Belanja Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dari keseluruhan nilai anggaran per jenis program adalah 26,32 persen atau senilai Rp1.531.788.000. Per 31 Desember 2025, komposisi realisasi Belanja Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 25,32 persen atau senilai Rp1.439.644.603. Sedangkan persentase realisasi Belanja Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik jika dibandingkan dengan anggarannya adalah sebesar 93,98 persen. Pagu ini digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BPS yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data.
2. Komposisi anggaran Belanja Program Dukungan Manajemen dari keseluruhan nilai anggaran per jenis program adalah 73,68 persen atau senilai Rp4.288.114.000. Per 31 Desember 2025, komposisi realisasi Belanja Program Dukungan Manajemen netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 74,68 persen atau senilai Rp4.247.169.158. Sedangkan persentase realisasi Belanja Program Dukungan Manajemen jika dibandingkan dengan anggarannya adalah sebesar 99,05 persen. Pagu ini digunakan untuk menampung kebutuhan biaya gaji dan tunjangan pegawai termasuk tunjangan kinerja pegawai, operasional perkantoran, dan kegiatan non operasional lainnya.

Tabel 7B
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana per 31 Desember 2025

Uraian	2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Rupiah Murni (RM)	5.819.902.000	5.686.813.761	97,71
PNBP	0	0	-
Hibah	0	0	-
Jumlah Netto	5.819.902.000	5.686.813.761	97,71

Apabila dilihat menurut sumber dana, realisasi belanja dengan sumber dana Rupiah Murni per 31 Desember 2025 adalah sebesar 97,71 persen. Selama Tahun Anggaran 2025 di BPS Kota Bontang tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja menggunakan sumber dana PNBPN maupun Hibah. Anggaran dalam kelompok sumber dana Rupiah Murni merupakan anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain:

1. Pengembangan dan Analisis Statistik (2896) sebesar Rp1.490.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp0 atau 0,00 persen;
2. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik (2897) sebesar Rp46.124.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp34.148.664 atau 74,04 persen;
3. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran (2898) sebesar Rp26.231.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp26.094.481 atau 99,48 persen;
4. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi (2899) sebesar Rp45.782.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp23.581.125 atau 51,51 persen;
5. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (2900) sebesar Rp2.906.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp0 atau 0,00 persen;
6. Pengembangan Sistem Informasi Statistik (2901) sebesar Rp41.450.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp23.230.080 atau 56,04 persen;
7. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi (2902) sebesar Rp254.273.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp249.265.431 atau 98,03 persen;
8. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga (2903) sebesar Rp134.857.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp134.837.661 atau 99,99 persen;
9. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi (2904) sebesar Rp90.557.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp90.535.500 atau 99,98 persen;
10. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (2905) sebesar Rp261.198.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp260.351.876 atau 99,68 persen;
11. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat (2906) sebesar Rp358.459.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp357.069.196 atau 99,61 persen;
12. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial (2907) sebesar Rp30.184.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp24.852.700 atau 82,34 persen;
13. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (2908) sebesar Rp136.286.000

- dengan realisasi belanja netto sebesar Rp115.515.364 atau 84,76 persen;
14. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (2909) sebesar Rp43.530.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp42.902.375 atau 98,56 persen;
 15. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (2910) sebesar Rp58.461.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp57.260.150 atau 97,95 persen;
 16. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi (2886) sebesar Rp4.288.114.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp4.247.169.158 atau 99,05 persen.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
BELANJA PEGAWAI	3.194.986.898	3.001.046.069	6,46
BELANJA BARANG	2.216.531.445	1.805.185.984	22,79
BELANJA MODAL	275.596.647	96.000.000	187,08
Jumlah Bruto	5.687.114.990	4.902.232.053	16,01
Pengembalian Belanja	301.229	9.534.806	(96,84)
Jumlah	5.686.813.761	4.892.697.247	16,23

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 16,23 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2024.

Realisasi Belanja Pegawai selama Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp193.940.829 atau sebesar 6,46 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Peningkatan realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2025 terjadi pada realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK, Belanja Lembur, dan Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan PPPK serta bertambahnya jumlah pegawai dengan jabatan fungsional di BPS Kota Bontang.

Realisasi Belanja Barang selama Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp411.345.461 atau sebesar 22,79 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Peningkatan realisasi Belanja Barang selama Tahun Anggaran 2025 terjadi pada realisasi Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, dan Belanja Pemeliharaan. Peningkatan ini secara umum dikarenakan

meningkatnya pelaksanaan program kegiatan sehingga kebutuhan akan barang konsumsi juga meningkat.

Realisasi Belanja Modal selama Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp179.596.647 atau sebesar 187,08 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Peningkatan realisasi Belanja Modal selama Tahun Anggaran 2025 terjadi pada realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Peningkatan disebabkan adanya pengadaan Genset 40 KVA Silent, pengadaan AC dan paket kamera di BPS Kota Bontang.

Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp301.229. Pengembalian belanja ini diperoleh dari pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp301.229 yang terdiri atas akun Belanja Gaji Pokok PNS dan Belanja Pembulatan Gaji PNS. Pengembalian Belanja Pegawai ini disebabkan adanya pengembalian gaji pokok pegawai bulan April-Juni 2025 dalam rangka pembatalan KGB berdasarkan SK Hukuman, dan potongan atas pembayaran belanja pegawai untuk kekurangan gaji bulan Februari-April 2025.

*Belanja Pegawai
Rp3.194.685.669*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.194.685.669 dan Rp2.991.647.263. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.565.288.627	1.537.499.800	1,81
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	76.811.700	45.900.545	67,34
Belanja Lembur	95.797.000	16.706.000	473,43
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.457.089.571	1.400.939.724	4,01
Jumlah Bruto	3.194.986.898	3.001.046.069	6,46
Pengembalian Belanja	301.229	9.398.806	(96,80)
Jumlah	3.194.685.669	2.991.647.263	6,79

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,79 persen dari 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,81 persen dibandingkan 31 Desember 2024 disebabkan adanya pegawai yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB), dan bertambahnya jumlah pegawai dengan jabatan fungsional.
2. Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 67,34 persen dibandingkan 31 Desember 2024 disebabkan adanya penambahan PPPK di BPS Kota Bontang per 1 Oktober 2025.
3. Belanja Lembur per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 473,43 persen dibandingkan per 31 Desember 2024 disebabkan meningkatnya kebutuhan penyelesaian pekerjaan di luar jam kerja.
4. Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,01 persen dibandingkan per 31 Desember 2024 disebabkan adanya penambahan PPPK di BPS Kota Bontang per 1 Oktober 2025.
5. Realisasi pengembalian belanja pegawai per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 96,80 persen dibandingkan 31 Desember 2024. Pengembalian belanja pegawai sebesar Rp301.229 dirinci sebagai berikut.
 - a. Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS n. Rizki Eka Maharsa bulan April-Juni 2025 sebesar Rp301.200 dalam rangka pembatalan SK KGB B-299/64741/KP.630/12/2024 berdasarkan SK Hukuman 001/6474/KPG TAHUN 2024. Pengembalian dilakukan melalui SPM Nomor 00053A tanggal 4 Maret 2025 sebesar Rp100.400, SPM Nomor 00091A tanggal 9 April 2025 sebesar Rp100.400, dan SPM Nomor 00123A tanggal 6 Mei 2025 sebesar Rp100.400.
 - b. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp29 atas nama Basaruddin Barata, Diah Rukmana Sari, dan Rivaldo Mubarak akibat pembayaran belanja pegawai untuk kekurangan gaji bulan Februari-April 2025 untuk 3 pegawai/ 8 jiwa. Pengembalian dilakukan melalui SPM Nomor 00097A tanggal 16 April 2025 sebesar Rp29.

Belanja Barang
Rp2.216.531.445

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.216.531.445 dan Rp1.805.049.984.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	137.147.643	115.294.293	18,95
Belanja Barang Non Operasional	1.027.039.274	639.263.235	60,66
Belanja Barang Persediaan	38.603.075	90.589.930	(57,39)
Belanja Jasa	361.205.253	423.646.741	(14,74)
Belanja Pemeliharaan	224.437.351	64.271.053	249,20
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	428.098.849	472.120.732	(9,32)
Jumlah Bruto	2.216.531.445	1.805.185.984	22,79
Pengembalian Belanja	0	136.000	(100,00)
Jumlah	2.216.531.445	1.805.049.984	22,80

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 22,80 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024.

Beberapa penjelasan terkait Belanja Barang diuraikan sebagai berikut:

1. Secara umum, peningkatan Belanja Barang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kegiatan besar yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2025 dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Pelaksanaan kegiatan ini berdampak pada meningkatnya Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Pemeliharaan.
2. Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 18,95 persen dibandingkan per 31 Desember 2024. Selama Tahun Anggaran 2025, belanja keperluan kantor mengalami peningkatan karena terdapat perubahan akun yang digunakan untuk mencatat pembayaran koneksi internet. Perubahan ini dilakukan dari menggunakan akun Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya (Belanja Jasa) pada tahun anggaran sebelumnya menjadi akun Belanja

Keperluan Perkantoran. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja per 31 Desember 2025 juga mengalami peningkatan akibat perubahan honor pengurus anggaran, pejabat pengadaan, pengurus BMN, dan pengelola SAI. Sedangkan, Belanja Barang Operasional Lainnya menurun dikarenakan selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat pengadaan seragam.

3. Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 60,66 persen dibandingkan per 31 Desember 2024. Peningkatan ini disumbangkan oleh meningkatnya Belanja Bahan berupa pendukung kegiatan teknis maupun non teknis, Belanja Honor Output Kegiatan berupa honor pendataan kegiatan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa asuransi petugas Wilkerstat, Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel berupa peralatan pendukung kegiatan perkantoran, Belanja Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel berupa pengadaan kanopi. Peningkatan Belanja Barang Non Operasional secara umum disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pendukung kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025.
4. Belanja Barang Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 57,39 persen dibandingkan per 31 Desember 2024. Penurunannya belanja barang persediaan ini disebabkan optimalisasi penggunaan barang persediaan yang masih ada dalam stok opname.
5. Belanja Jasa per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 14,74 persen dibandingkan per 31 Desember 2024. Penurunan ini disumbangkan oleh penurunan Belanja Langganan Listrik, Belanja Langganan Air, dan Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya. Penurunan Belanja Langganan Listrik disebabkan masih terdapat sisa token listrik akhir tahun sebagai BDDM yang digunakan di Tahun Anggaran 2024 Selain itu, per 13 Desember 2025, kantor BPS Kota Bontang menggunakan listrik meteran pascabayar. Belanja Langganan Daya mengalami penurunan disebabkan adanya perubahan akun yang digunakan untuk mencatat pembayaran koneksi internet. Perubahan ini dilakukan dari menggunakan akun Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 menjadi akun Belanja Keperluan Perkantoran di Tahun Anggaran 2025.
6. Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 249,20 persen dibandingkan per 31 Desember 2024. Peningkatan ini disumbangkan oleh peningkatan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

Selama Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan perbaikan besar terhadap aset gedung dan kendaraan operasional kantor.

7. Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 9,32 persen dibandingkan per 31 Desember 2024. Penurunan ini disumbangkan oleh menurunnya Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah perjalanan dinas luar kota tanpa maupun dengan paket meeting yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025.

Selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat pengembalian Belanja Barang.

Belanja Modal
Rp275.596.647

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp275.596.647 dan Rp96.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	275.596.647	96.000.000	187,08
Jumlah Bruto	275.596.647	96.000.000	187,08
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	275.596.647	96.000.000	187,08

Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan pada 31 Desember 2025 sebesar 187,08 persen dibandingkan 31 Desember 2024 disebabkan oleh adanya pengadaan peralatan dan mesin berupa Genset 40 KVA Silent, pengadaan AC dan paket kamera di BPS Kota Bontang.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp275.596.647 dan Rp96.000.000.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	275.596.647	96.000.000	187,08
Jumlah Bruto	275.596.647	96.000.000	187,08
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	275.596.647	96.000.000	187,08

Realisasi tersebut pada 31 Desember 2025, mengalami kenaikan sebesar 187,08 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2024 sebesar Rp96.000.000.

Adapun Belanja Modal yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut.

- Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa 1 (satu) unit Genset Silent 40 kVa Yucai Y2CV2.5T55-G20 sesuai BAST No.158/PPK/BPS-BONTANG/2025 tanggal 24 November 2025 senilai Rp199.800.000.
- Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa 1 (satu) paket kamera Sony A6400 Mirrorless sesuai BAST No. 150/PPK/BPS-BONTANG/2025 tanggal 3 November 2025 senilai Rp19.996.650.
- Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa 6 (enam) unit AC Daikin 2PK FTC50YV14 sesuai BAST No. 152/PPK/BPS-BONTANG/2025 tanggal 17 November 2025 senilai Rp55.799.997.

Sedangkan, Belanja Modal yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 meliputi pembelian sebagai berikut.

- Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa Laptop merek Asus N B1402CBA ID-NK7850X/16-1 sebanyak 4 (empat) unit dengan BAST No. 455/PPK/BPS-BONTANG/12/2024 pada tanggal 10 Desember 2024 senilai Rp96.000.000.

C.PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Belanja Dibayar di Muka Rp998.314

C.1 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp998.314 dan Rp12.379.563. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Tabel 13
Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Jenis	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	998.314	12.379.563
Jumlah	998.314	12.379.563

Belanja barang yang dibayar di muka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp998.314. Nilai ini terdiri dari komponen sebagai berikut.

- Belanja dibayar di muka keperluan perkantoran berupa sisa langganan *Web Domain* per 31 Desember 2025 selama 174 hari hingga 23 Juni 2026 senilai Rp107.265.
- Belanja dibayar di muka keperluan perkantoran berupa sisa langganan *Zoom Workplace Pro Annual* per 31 Desember 2025 selama 145 hari hingga 25 Mei 2026 senilai Rp684.576.
- Belanja dibayar di muka keperluan perkantoran berupa sisa langganan *Canva Pro* per 31 Desember 2025 selama 98 hari hingga 8 April 2026 senilai Rp206.473.

Persediaan Rp14.864.260

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp14.864.260 dan Rp51.621.251. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Barang Konsumsi	13.559.845	48.105.029
Bahan untuk Pemeliharaan	1.304.415	3.516.222
Jumlah	14.864.260	51.621.251

Per 31 Desember 2025, nilai persediaan tercatat sebesar Rp14.864.260, yang terdiri atas barang konsumsi senilai Rp13.559.845 dan bahan untuk pemeliharaan senilai Rp1.304.415. Nilai persediaan tersebut merupakan hasil *stock opname* persediaan yang telah dilaksanakan pada akhir periode pelaporan untuk memastikan kesesuaian antara jumlah fisik persediaan dengan pencatatan dalam sistem akuntansi. Seluruh persediaan tersebut dalam kondisi baik.

Mutasi Nilai Persediaan 31 Desember 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024	51.621.251
Mutasi Tambah :	
Pembelian	40.053.075
Transfer Masuk	45.456.899
Total Mutasi Tambah	85.509.974
Mutasi Kurang :	
Habis Pakai	(122.266.965)
Total Mutasi Kurang	(122.266.965)
Kenaikan(Penurunan)	(36.756.991)
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2025	14.864.260

Per 31 Desember 2025 terdapat mutasi tambah persediaan sebesar Rp85.509.974. Mutasi penambahan persediaan terdiri dari transfer masuk dan pembelian persediaan. Beberapa penjelasan terkait mutasi tambah persediaan adalah sebagai berikut.

- a. Pembelian persediaan sebesar Rp40.053.075 berupa Barang Konsumsi sebesar Rp38.099.525 dan Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp1.953.550.
- b. Transfer Masuk sebesar Rp45.456.899 merupakan transfer barang persediaan berupa barang konsumsi dari BPS Provinsi Kalimantan Timur berupa:
 1. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-019/64510/PL.714/2025 Tanggal 14 April 2025 yang terdiri dari 8 eksemplar Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur (STPIM), 47 eksemplar Survei Perusahaan Konstruksi (SKTH), 15 eksemplar Survei Konstruksi Triwulanan (SKTR) Triwulan 1, 15 eksemplar Survei Konstruksi Triwulanan (SKTR) Triwulan 2, 15 eksemplar Survei Konstruksi Triwulanan (SKTR) Triwulan 3, 100 eksemplar Updating Direktori Perusahaan Konstruksi (UDP), 17 eksemplar Survei Captive Power, 1 eksemplar Survei Air Bersih Tahunan senilai Rp384.807.
 2. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-031/64510/PL.714/2025 Tanggal 23 Mei 2025 yang terdiri dari 137 eksemplar Kuesioner Seruti Inti VSERUTI25.INTI, 137 eksemplar Kuesioner Seruti MAK VSERUTI25.MAK senilai Rp1.748.805.
 3. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-050/64510/PL.714/2025 Tanggal 29 Juli 2025 yang terdiri dari 24 set Kuesioner Sakernas Agustus 2025 (Daftar SAK.AGS25-AK), dan 24 buku Buku Pedoman Pencacah Sakernas Agustus 2025 senilai Rp4.015.992.
 4. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-064/64510/PL.714/2025 Tanggal 25 Agustus 2025 yang terdiri dari 158 set Kuesioner Susenas VSEN25.M, 158 set Kuesioner Susenas VSEN25.KP, dan 18 buku Buku Konsep dan Definisi Susenas September 2025 senilai Rp5.952.962.
 5. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-074/64510/PL.714/2025 Tanggal 25 Agustus 2025 yang terdiri dari 158 set Kuesioner Seruti Inti VSERUTI2INTI senilai Rp898.704.
 6. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-084/64510/PL.714/2025 Tanggal 26 Agustus

2025 yang terdiri dari 49 set Kuesioner Survei IMK Tahunan 2025 senilai Rp163.170.

7. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-187/64510/PL.714/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 yang terdiri dari 148 set Kuesioner Seruti Inti VSERUTI25.INTI, 148 set Kuesioner Seruti MAK VSERUTI25.MAK senilai Rp2.58336.
8. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-191/64510/PL.714/2025 Tanggal 17 November 2025 yang terdiri dari 2 buah Sandisk 256 Gb MBG Bontang, 2 buah Mouse Logitech MBG Bontang, 1 buah Tinta Epson T7741 Black MBG Bontang, 1 buah Tinta Epson T6642 Cyan MBG Bontang, 1 buah Tinta Epson T6643 Magenta MBG Bontang; 1 buah Tinta Epson T6644 Yellow MBG Bontang, 1 buah Tinta Epson 001 Black MBG Bontang, 1 buah Tinta Epson 001 Cyan MBG Bontang, 1 buah Tinta Epson 001 Magenta MBG Bontang, 1 buah Tinta Epson 001 Yellow MBG Bontang, 12 kotak BINDER CLIP NO 111 MBG Bontang, 12 kotak BINDER CLIP NO 155 MBG Bontang, 12 kotak BINDER CLIP NO 105 MBG Bontang, 10 rim Kertas HVS A4 75 Gsm MBG Bontang senilai Rp2.987.400.
9. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-201/64510/PL.714/2025 Tanggal 28 November 2025 yang terdiri dari 818 set Kuesioner HP, Kuesioner HP-JG, Kuesioner HP-JA, Kuesioner HP-JK, Kuesioner HP-JLP, Kuesioner HP-JP, Kuesioner HP-JR, Kuesioner HP-JS, Kuesioner HP-JTB, Kuesioner HP-JTDL, Kuesioner Suplemen SHP senilai Rp3.410.142.
10. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-218/64510/PL.714/2025 Tanggal 23 Desember 2025 yang terdiri dari 782 pcs Kuesioner Susenas VSEN26.K, 782 pcs Kuesioner Susenas VSEN26.KP, dan Kuesioner Seruti VSERUTI26.INTI senilai Rp23.307.581.

Per 31 Desember 2025 terdapat mutasi kurang persediaan sebesar Rp122.266.965. Mutasi pengurangan persediaan terdiri atas pemakaian (habis pakai). Pengurangan persediaan yang berasal dari pemakaian persediaan hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp122.266.965. Pemakaian ini terdiri atas pemakaian Barang Konsumsi senilai Rp118.101.608 dan Bahan untuk Pemeliharaan senilai Rp4.165.357.

Tanah
Rp1.504.778.000

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.504.778.000 dan Rp1.504.778.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024	1.504.778.000
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025	1.504.778.000

Tanah bangunan rumah negara Gol. I seluas 271 m² senilai Rp269.983.000 yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Pada tanggal pelaporan dikuasai/ digunakan untuk rumah dinas Kepala BPS Kota Bontang dengan sertifikat Nomor 16.08.01.02.4.00038 atas nama Pemerintah RI c.q Badan Pusat Statistik.

Tanah Kantor seluas 796 m² senilai Rp1.234.795.000 yang terletak di Jalan Awang Long, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, bersumber dari pembelian dengan sertifikat Nomor 16.08.01.02.4.00039 atas nama Pemerintah RI c.q Badan Pusat Statistik.

Tanah bangunan rumah dan tanah kantor tersebut di atas dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

Peralatan dan
Mesin
Rp2.523.842.667

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp2.523.842.667 dan Rp2.235.895.972. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024	2.235.895.972
Mutasi Tambah :	

Pembelian	275.596.647
Transfer Masuk	14.072.000
Reklasifikasi Masuk	199.800.000
Total Mutasi Tambah	489.468.647
:	
Mutasi Kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1.721.952)
Reklasifikasi Keluar	(199.800.000)
Total Mutasi Kurang	(201.521.952)
:	
Kenaikan(Penurunan)	287.946.695
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025	2.523.842.667
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2025	(1.881.927.688)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2025	641.914.979

Per 31 Desember 2025 terdapat mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp489.468.647. Mutasi tambah Peralatan dan Mesin terdiri atas Pembelian, Transfer Masuk, dan Reklasifikasi Masuk. Beberapa penjelasan terkait mutasi tambah Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

- a. Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp275.596.647 berupa:
 1. Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa 1 (satu) unit Genset Silent 40 kVa Yucai Y2CV2.5T55-G20 sesuai BAST No.158/PPK/BPS-BONTANG/2025 tanggal 24 November 2025 senilai Rp199.800.000.
 2. Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa 1 (satu) paket kamera Sony A6400 Mirrorless sesuai BAST No. 150/PPK/BPS-BONTANG/2025 tanggal 3 November 2025 senilai Rp19.996.650.
 3. Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa 6 (enam) unit AC Daikin 2PK FTC50YV14 sesuai BAST No. 152/PPK/BPS-BONTANG/2025 tanggal 17 November 2025 senilai Rp55.799.997.

- b. Transfer Masuk Peralatan dan Mesin diperoleh dari BPS Provinsi Kalimantan Timur sesuai BASTP Nomor B-009/64000/PL.714/2025 tanggal 15 Januari 2025 berupa 4 (empat) unit Alat Bantu Uji Tumbuh Alat Ubinan senilai Rp 14.072.000.
- c. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp199.800.000 terdiri atas reklasifikasi masuk genset. Reklasifikasi dilakukan karena adanya kesalahan pemilihan kodifikasi untuk peralatan dan mesin genset Silent 40 kVa Yucai Y2CV2.5T55-G20 dengan kode awal barang berupa Genset menjadi Stationary Generating Set.

Per 31 Desember 2025 terdapat mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp201.521.952. Mutasi pengurangan peralatan dan mesin terdiri atas Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang dan Reklasifikasi Keluar. Beberapa penjelasan terkait mutasi kurang peralatan dan mesin adalah sebagai berikut.

- a. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp1.721.952 dilakukan sebagai tindak lanjut hasil audit BPK tahun 2023 dan ditetapkan melalui Surat Keterangan Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kota Bontang Selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor B-261/6474/PL.610/2025 tentang Perbaikan (Koreksi) Pembukuan Barang Milik Negara Pada Kantor Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 tanggal 24 Oktober 2025.

Rincian perubahan (koreksi) pembukuan BMN pada Kantor BPS Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 14A
Rincian Perubahan (Koreksi) Pembukuan BMN
per 31 Desember 2025

No	NUP	Nama Barang	Nilai Awal	Nilai Akhir	Perubahan Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2	Station Wagon	Rp334.700.000	Rp334.258.048	-Rp441.952
2	31	P.C Unit	Rp27.970.000	Rp27.900.000	-Rp70.000
3	32	P.C Unit	Rp27.970.000	Rp27.900.000	-Rp70.000
4	33	P.C Unit	Rp27.970.000	Rp27.900.000	-Rp70.000
5	34	P.C Unit	Rp27.970.000	Rp27.900.000	-Rp70.000
6	35	P.C Unit	Rp27.970.000	Rp27.900.000	-Rp70.000

7	36	P.C Unit	Rp27.970.000	Rp27.900.000	-Rp70.000
8	37	P.C Unit	Rp27.970.000	Rp27.900.000	-Rp70.000
9	38	P.C Unit	Rp27.970.000	Rp27.900.000	-Rp70.000
10	39	P.C Unit	Rp27.970.000	Rp27.900.000	-Rp70.000
11	40	P.C Unit	Rp27.970.000	Rp27.900.000	-Rp70.000
12	27	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Rp1.760.000	Rp1.750.000	-Rp10.000
13	28	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Rp1.760.000	Rp1.750.000	-Rp10.000
14	29	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Rp1.760.000	Rp1.750.000	-Rp10.000
15	30	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Rp1.760.000	Rp1.750.000	-Rp10.000
16	31	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Rp1.760.000	Rp1.750.000	-Rp10.000
17	32	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Rp1.760.000	Rp1.750.000	-Rp10.000
18	33	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Rp1.760.000	Rp1.750.000	-Rp10.000
19	34	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Rp1.760.000	Rp1.750.000	-Rp10.000
20	35	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Rp1.760.000	Rp1.750.000	-Rp10.000
21	36	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Rp1.760.000	Rp1.750.000	-Rp10.000
22	5	Scanner	Rp20.980.000	Rp20.500.000	-Rp480.000
Total Perubahan					-Rp1.721.952

- b. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp199.800.000 terdiri atas reklasifikasi keluar genset. Reklasifikasi dilakukan karena adanya kesalahan pemilihan kodifikasi untuk peralatan dan mesin genset Silent 40 kVa Yucai Y2CV2.5T55-G20 dengan kode awal barang berupa Genset menjadi *Stationary Generating Set*.

Peralatan dan Mesin lainnya yang ada di BPS Kota Bontang dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

*Gedung dan
Bangunan
Rp2.874.089.197*

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp2.874.089.197 dan Rp2.874.089.197. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024	2.874.089.197
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025	2.874.089.197
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2025	(339.597.030)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2025	2.534.492.167

Gedung dan Bangunan BPS Kota Bontang terdiri dari Bangunan Gedung Tempat Kerja di Jalan Awang Long No.2 Bontang Baru senilai Rp 2.574.717.197; Bangunan Gedung Tempat Tinggal di Jalan Dewi Sartika, Bontang Baru senilai Rp 208.480.000; dan Pagar Permanen senilai Rp 90.892.000. Gedung dan Bangunan tersebut di atas dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

*Aset Tetap Lainnya
Rp10.669.400*

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp10.669.400 dan Rp102.281.121. Nilai mutasi atas aset tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024	102.281.121
Mutasi Tambah :	

Total Mutasi Tambah	0
:	
Mutasi Kurang :	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(91.611.721)
Total Mutasi Kurang	(91.611.721)
:	
Kenaikan(Penurunan)	(91.611.721)
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025	10.669.400
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2025	0
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2025	10.669.400

Aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan tercetak senilai Rp102.281.121. Per 31 Desember 2025 tidak terdapat mutasi tambah, namun terdapat mutasi kurang aset tetap lainnya. Mutasi kurang aset tetap lainnya berupa Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp91.611.721 sesuai Surat Keterangan Perubahan Kondisi BMN Nomor B-292/64741/PL.520/2025 tanggal 17 November 2025.

Rincian aset tetap lainnya yang mengalami penghentian aset dari penggunaan selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 14B
Rincian aset tetap lainnya yang mengalami penghentian aset dari penggunaan per 31 Desember 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Laporan	230	Buah	Rp10.929.352
2	Monografi	2	Buah	Rp96.200
3	Serial Lainnya	1059	<i>Dummy</i>	Rp80.035.769
4	Referensi	10	Buah	Rp550.400
Total Jumlah				Rp91.611.721

Selain aset tetap yang dihentikan penggunaannya, aset tetap lainnya masih dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp2.221.524.718*

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp2.221.524.718 dan Rp1.933.513.704. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 15
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	2.523.842.667	1.881.927.688	641.914.979
Gedung dan Bangunan	2.874.089.197	339.597.030	2.534.492.167
Aset Tetap Lainnya	10.669.400	0	10.669.400
Jumlah	5.408.601.264	2.221.524.718	3.187.076.546

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Nilai Perolehan Aset Tetap sebesar Rp5.408.601.264 mengalami penyusutan sebesar Rp2.221.524.718 sampai dengan 31 Desember 2025. Nilai penyusutan ini disumbangkan dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp1.881.927.688 serta akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp339.597.030. Penyusutan ini menyebabkan per 31 Desember 2025 Nilai Buku Aset Tetap BPS Kota Bontang menjadi sebesar Rp3.187.076.546.

*Aset Tak Berwujud
Rp25.700.000*

C.8 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp25.700.000 dan Rp25.700.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Aset Tak berwujud 31 Desember 2025

Uraian	Nilai Perolehan
Software	25.700.000
Jumlah	25.700.000

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024	25.700.000
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2025	25.700.000
Akumulasi Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2025	(25.700.000)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2025	0

Pada aset tidak berwujud, tidak terdapat mutasi penambahan maupun mutasi pengurangan per 31 Desember 2025. Adapun akumulasi amortisasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.700.000 sehingga nilai buku menjadi Rp0.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp17.058.173

C.9 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp17.058.173 dan Rp27.583.170. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaan berasal dari dana di rekening penampungan Kementerian/Lembaga.

Tabel 16A
Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	17.058.173	27.583.170
Jumlah	17.058.173	27.583.170

Tabel 16B
Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025

No.	Uraian Transaksi	Nama Vendor/ Rekanan	Tanggal Pembayaran	Nilai (Rp)
1	Pengadaan Jasa Manajemen Building Jasa Kebersihan	PT Arco Samudra Perkasa	05/01/2026	5.472.629
2	Pengadaan Jasa Manajemen Building Jasa Keamanan	PT Arco Samudra Perkasa	05/01/2026	11.585.544
Jumlah				17.058.173

Tabel 16C
Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025

No.	Uraian Transaksi	Akun	Saldo Awal Dana dalam Rekening Penampungan (Rp)	Tingkat Penyelesaian Pekerjaan pada Periode Pelaporan (%)	Nilai Realisasi Belanja Berdasarkan Progres Penyelesaian (Rp)	Nilai (Rp)
1	Pengadaan Jasa Manajemen Building Jasa Kebersihan	522191	0	100%	5.472.629	5.472.629
2	Pengadaan Jasa Manajemen Building Jasa Keamanan	522191	0	100%	11.585.544	11.585.544
Jumlah						17.058.173

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.058.173 merupakan dana pada RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) yang digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d. tanggal 31 Desember 2025. Dana pada RPATA tersebut digunakan untuk membayar Belanja Barang Jasa Lainnya berupa Jasa Manajemen Building Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan bulan Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pembayaran termin 3 jasa manajemen building jasa kebersihan bulan Desember 2025 sesuai kontrak nomor EP-01K64PAT2CA1TAZS82RCZ3R5W3 tanggal 29 September 2025 sebesar Rp5.472.629 kepada PT Arco Samudra Perkasa.
 - Pengisian RPATA diajukan menggunakan SPTJM Atas Pengajuan Penampungan Melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran No. SPTJM-171/00544T/637237/2025 tanggal 17 Desember 2025 dan SPM Nomor 00544A tanggal 17 Desember 2025 sebesar Rp5.472.629.
 - Pembayaran menggunakan RPATA diajukan menggunakan SPTJM Atas Pembayaran Dari Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran No. SPTJM-172/00003T/637237/2026 tanggal 2 Januari 2026 dan SPM Nomor 00003A tanggal 5 Januari 2026 sebesar Rp5.472.629.
- b. Pembayaran termin 3 jasa manajemen building jasa keamanan bulan Desember 2025 sesuai kontrak nomor EP-01K64P6V5GVSTTPTGB8PYE26BQ tanggal 29 September 2025 sebesar Rp11.585.544 kepada PT Arco Samudra Perkasa.
 - Pengisian RPATA diajukan menggunakan SPTJM Atas Pengajuan Penampungan Melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran No. SPTJM-171/00545T/637237/2025 tanggal 17 Desember 2025 dan SPM Nomor 00545A tanggal 17 Desember 2025 sebesar Rp11.585.544.
 - Pembayaran menggunakan RPATA diajukan menggunakan SPTJM Atas Pembayaran Dari Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran No. SPTJM-172/00004T/637237/2026 tanggal 2 Januari 2026 dan SPM Nomor 00004A tanggal 5 Januari 2026 sebesar Rp11.585.544.

Aset Lain-lain
Rp289.070.220

C.10 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp289.070.220 dan Rp197.458.499. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi

digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024	197.458.499
Mutasi Tambah :	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	91.611.721
Total Mutasi Tambah :	91.611.721
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	91.611.721
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2025	289.070.220
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2025	(197.458.499)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2025	91.611.721

Per 31 Desember 2025 terdapat mutasi tambah aset lain-lain sebesar Rp91.611.721. Mutasi tambah ini terdiri dari Penghentiaan Aset Dari Penggunaan sebesar RpRp91.611.721 sesuai Surat Keterangan Perubahan Kondisi BMN Nomor B-292/64741/PL.520/2025 tanggal 17 November 2025. Rincian aset lain-lain yang diperoleh dari penghentian aset dari penggunaan selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

*Tabel 16D
Rincian aset lain-lain per 31 Desember 2025*

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Laporan	230	Buah	Rp10.929.352
2	Monografi	2	Buah	Rp96.200
3	Serial Lainnya	1059	<i>Dummy</i>	Rp80.035.769
4	Referensi	10	Buah	Rp550.400
Total Jumlah				Rp91.611.721

Nilai akumulasi penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp197.458.499. Sehingga nilai buku Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp91.611.721.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp223.158.499*

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp223.158.499 dan Rp223.158.499. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Software	25.700.000	25.700.000	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	289.070.220	197.458.499	91.611.721
Jumlah	314.770.220	223.158.499	91.611.721

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Per 31 Desember 2025 nilai akumulasi penyusutan/amortisasi sebesar Rp223.158.499. Nilai penyusutan ini disumbang dari penyusutan/amortisasi *software* sebesar Rp25.700.000 dan penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp197.458.499. Nilai penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan dirinci sebagai berikut sesuai Surat Keterangan Perubahan Kondisi BMN Nomor B-327/64741/PL.520/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan Surat Keterangan Perubahan Kondisi BMN Nomor B-326/64741/PL.520/12/2024 tanggal 31 Desember 2024.

Tabel 17A
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

No.	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	Note Book merek Lenovo/T4204177	17.584.500	17.584.500	0
2	Note Book merek Fujitsu/SH782	15.510.000	15.510.000	0
3	Sepeda Motor merek Honda Mega Pro plat KT 2428 D	17.476.999	17.476.999	0
4	Sepeda Motor merek Honda NF125 TD plat KT 2542 D	12.732.000	12.732.000	0
5	Sepeda Motor merek HONDA/SUPRA X 125 TD plat KT 2882 D	14.945.000	14.945.000	0
6	Sepeda Motor merek HONDA/SUPRA X 125 TD plat KT 2883 D	14.945.000	14.945.000	0
7	Sepeda Motor merek NEW MEGA PRO SP plat KT 2889 D	18.845.000	18.845.000	0
8	Sepeda Motor merek Honda VERSA CW plat KT 2969 D	17.880.000	17.880.000	0
9	Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 plat KT 2968 D	16.820.000	16.820.000	0
10	Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 plat KT 2967 D	16.820.000	16.820.000	0
11	Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 plat KT 2966 D	16.820.000	16.820.000	0
12	Sepeda Motor merek SUPRA X 125 FI CW plat KT 2535 D	17.080.000	17.080.000	0
13	Laporan	10.929.352	0	10.929.352
14	Monografi	96.200	0	96.200
15	Serial Lainnya	80.035.769	0	80.035.769
16	Referensi	550.400	0	550.400
Jumlah		289.070.220	197.458.499	91.611.721

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp141.245.359

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp141.245.359 dan Rp138.280.788. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban

yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Kota Bontang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2025 dan 2024

Jenis	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	118.209.221	107.079.279
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	5.977.965	3.618.339
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	17.058.173	27.583.170
Jumlah	141.245.359	138.280.788

- a. Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp118.209.221 terdiri atas Belanja Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2025 dengan rincian berikut.
 - Belanja tunjangan kinerja susulan PNS bulan Desember 2025 untuk 21 pegawai sebesar Rp103.765.076.
 - Belanja tunjangan PPh PNS bulan Desember 2025 untuk 21 pegawai sebesar Rp4.665.245.
 - Belanja tunjangan kinerja susulan PPPK bulan Desember 2025 untuk 3 pegawai sebesar Rp9.778.900.

- b. Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp5.977.965 terdiri atas belanja langganan internet, langganan air, dan langganan telepon, dan langganan listrik Bulan Desember 2025 dengan rincian berikut.
 - Belanja langganan internet bulan Desember 2025 sebesar Rp3.361.857.
 - Belanja langganan telepon bulan Desember 2025 sebesar Rp31.857.
 - Belanja langganan air bulan Desember 2025 sebesar Rp143.625.
 - Belanja langganan listrik bulan Desember 2025 sebesar Rp 2.440.626.

- c. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp17.058.173 terdiri dari belanja barang Jasa Lainnya berupa pengadaan Jasa Manajemen Building dengan rincian berikut.

- Belanja Jasa Manajemen Building Jasa Kebersihan bulan Desember 2025 sesuai Kontrak No EP-01K64PAT2CA1TAZS82RCZ3R5W3 tanggal 29 September 2025 sebesar Rp5.472.629. Anggaran belanja ini ditampung melalui RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) sebesar Rp5.472.629.
- Belanja Jasa Manajemen Building Jasa Keamanan bulan Desember 2025 sesuai Kontrak No EP-01K64P6V5GVSTTPTGB8PYE26BQ tanggal 29 September 2025 sebesar Rp11.585.544. Anggaran belanja ini ditampung melalui RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) sebesar Rp11.585.544.

Ekuitas
Rp4.675.141.655

C.13 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.675.141.655 dan Rp4.736.833.782. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBP
Rp3.412.164

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.412.164 dan Rp1.921.652. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 19
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun)%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1.921.652	(100,00)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	3.412.164	0	0,00
Jumlah	3.412.164	1.921.652	77,56

Per 31 Desember 2025, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibandingkan per 31 Desember 2024 yaitu menjadi Rp0. Hal ini terjadi karena adanya perubahan akun yang digunakan untuk menampung pendapatan sewa rumah dinas pada Tahun Anggaran 2025 yang semula menggunakan akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan menjadi akun Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi. Sehingga, per 31 Desember 2025 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi meningkat sebesar 100,00 persen dibanding per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp3.412.164.

Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp3.412.164 berasal dari sewa rumah dinas pejabat Eselon III yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kota Bontang. Nilai PNBP ini diperoleh dari biaya sewa rumah dinas selama 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp3.412.164.

Nilai sewa rumah dinas ditetapkan dalam Kepka BPS Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tarif Sewa Rumah Negara Golongan I Badan Pusat Statistik di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Tarif sewa rumah negara golongan I untuk rumah dinas yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika Kota Bontang adalah sebesar Rp284.347 per bulan.

Tabel 20
Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak
Sampai 31 Desember 2025

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	3.412.164	3.412.164	0
Jumlah	3.412.164	3.412.164	0

Per 31 Desember 2025 tidak terdapat selisih antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Beban Pegawai
Rp3.205.815.611

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.205.815.611 dan Rp2.999.680.269. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 21
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun)%
Beban Gaji Pokok PNS	993.480.600	989.345.742	0,42
Beban Pembulatan Gaji PNS	14.125	15.729	(10,20)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	70.350.590	70.600.350	(0,35)
Beban Tunj. Anak PNS	15.369.092	15.389.320	(0,13)
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	26.460.000	(4,76)
Beban Tunj. Fungsional PNS	152.400.000	136.380.000	11,75
Beban Tunj. PPh PNS	105.888.576	75.900.577	39,51
Beban Tunj. Beras PNS	48.738.660	51.128.520	(4,67)
Beban Uang Makan PNS	158.211.000	158.695.000	(0,30)
Beban Tunjangan Umum PNS	0	7.339.950	(100,00)
Beban Gaji Pokok PPPK	55.092.200	34.305.600	60,59
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.540	905	70,17

Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	753.450	0	0,00
Beban Tunjangan Anak PPPK	452.070	0	0,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5.040.000	4.320.000	16,67
Beban Tunjangan Beras PPPK	2.317.440	869.040	166,67
Beban Uang Makan PPPK	12.075.000	6.405.000	88,52
Beban Tunjangan Umum PPPK	1.080.000	0	0,00
Beban Uang Lembur	89.931.000	15.272.000	488,86
Beban Uang Lembur PPPK	5.866.000	1.434.000	309,07
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.395.555.990	1.367.127.203	2,08
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja PPPK	67.998.278	38.691.333	75,75
Jumlah	3.205.815.611	2.999.680.269	6,87

Beban Pegawai per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 6,87 persen dibandingkan 31 Desember 2024. Beberapa penjelasan terkait beban pegawai diuraikan sebagai berikut.

- a. Secara umum penurunan Beban Pembulatan Gaji PNS, Beban Tunj. Suami/Istri PNS, Beban Tunj. Anak PNS, Beban Tunj. Beras PNS, Beban Uang Makan PNS, disebabkan oleh berkurangnya jumlah tanggungan pegawai BPS Kota Bontang pada Tahun Anggaran 2025.
- b. Peningkatan Beban Gaji Pokok PNS dan Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) disebabkan adanya penambahan pegawai di BPS Kota Bontang.
- c. Peningkatan Beban Tunj. Fungsional PNS sebesar 11,75 persen disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai dengan jabatan fungsional. Penambahan ini disebabkan oleh beberapa pegawai yang beralih jabatan pelaksana menjadi fungsional.
- d. Peningkatan Beban Tunj. PPh PNS sebesar 39,51 persen disebabkan karena meningkatnya beban PPh PNS untuk Pembayaran THR dan Gaji ke-13 Tahun 2025.
- e. Penurunan Beban Tunjangan Umum PNS sebesar 100,00 persen disebabkan sudah tidak ada pegawai yang memiliki jabatan fungsional umum selama TA 2025.
- f. Peningkatan Beban Gaji Pokok PPPK, Beban Pembulatan Gaji PPPK, Beban Tunjangan Fungsional PPPK, Beban Tunjangan Beras PPPK, Beban Uang Makan PPPK, Beban

Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja PPPK disebabkan oleh penambahan PPPK baru di BPS Kota Bontang per 1 Oktober 2025.

- g. Peningkatan Beban Uang Lembur sebesar 488,86 persen dan Beban Uang Lembur PPPK sebesar 309,07 persen disebabkan meningkatnya kebutuhan penyelesaian pekerjaan di luar jam kerja selama Tahun Anggaran 2025.

Tabel 22
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai
Sampai 31 Desember 2025

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	993.480.600	993.480.600	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	14.125	14.125	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	70.350.590	70.350.590	0
Beban Tunj. Anak PNS	15.369.092	15.369.092	0
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	152.400.000	152.400.000	0
Beban Tunj. PPh PNS	105.888.576	101.223.331	4.665.245
Beban Tunj. Beras PNS	48.738.660	48.738.660	0
Beban Uang Makan PNS	158.211.000	158.211.000	0
Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0
Beban Gaji Pokok PPPK	55.092.200	55.092.200	0
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.540	1.540	0
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	753.450	753.450	0
Beban Tunjangan Anak PPPK	452.070	452.070	0
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5.040.000	5.040.000	0
Beban Tunjangan Beras PPPK	2.317.440	2.317.440	0
Beban Uang Makan PPPK	12.075.000	12.075.000	0
Beban Tunjangan Umum PPPK	1.080.000	1.080.000	0
Beban Uang Lembur	89.931.000	89.931.000	0
Beban Uang Lembur PPPK	5.866.000	5.866.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.395.555.990	1.395.359.793	196.197
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	67.998.278	61.729.778	6.268.500
Jumlah	3.205.815.611	3.194.685.669	11.129.942

Berikut merupakan rincian penyebab selisih nilai LO dan LRA Beban Pegawai per 31 Desember 2025:

- a. Selisih LO dan LRA Beban Tunj. PPh PNS sebesar Rp4.665.245 disebabkan adanya Tunjangan PPh PNS bulan Desember 2025 yang akan dibayarkan di bulan Januari 2026 sebesar Rp4.665.245.

- b. Selisih LO dan LRA Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja) sebesar Rp196.197 merupakan selisih Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Desember Tahun 2024 yang dibayarkan bulan Januari 2025 senilai (Rp103.568.879) dengan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Desember Tahun 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari 2026 senilai Rp103.765.076.
- c. Selisih LO dan LRA Beban Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp6.268.500 merupakan selisih Pembayaran Tunjangan Kinerja PPPK Bulan Desember Tahun 2024 yang dibayarkan bulan Januari 2025 senilai (Rp3.510.400) dengan Pembayaran Tunjangan Kinerja PPPK Bulan Desember Tahun 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari 2026 senilai Rp9.778.900.

*Beban Persediaan
Rp118.101.608*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan sampai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp118.101.608 dan Rp164.669.839. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 23
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember
2024*

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik(Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	118.101.608	164.669.839	(28,28)
Jumlah	118.101.608	164.669.839	(28,28)

Beban Persediaan Konsumsi per 31 Desember 2025 mengalami penurunan dibandingkan 31 Desember 2024 sebesar 28,28 persen. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh menurunnya transfer masuk barang konsumsi dari BPS Provinsi Kalimantan Timur untuk keperluan pendukung kegiatan teknis, serta dipengaruhi oleh perubahan metode beberapa survei dari PAPI ke CAPI.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp1.539.133.045*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.539.133.045 dan Rp1.171.617.843. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan

jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 24
Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	78.901.315	29.188.950	170,31
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	57.960.000	57.240.000	1,26
Beban Barang Operasional Lainnya	0	27.120.000	(100,00)
Beban Bahan	79.783.450	33.714.000	136,65
Beban Honor Output Kegiatan	897.125.000	578.303.000	55,13
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.719.824	440.235	744,96
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	16.705.000	1.710.000	876,90
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	29.706.000	24.960.000	19,01
Beban Langganan Listrik	59.169.703	51.412.660	15,09
Beban Langganan Telepon	429.025	402.284	6,65
Beban Langganan Air	2.041.125	2.469.000	(17,33)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.233.430	33.659.674	(90,39)
Beban Jasa Lainnya	310.359.173	330.998.040	(6,24)
Jumlah	1.539.133.045	1.171.617.843	31,37

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 31,37 persen dibandingkan dengan kondisi per 31 Desember 2024. Beberapa penjelasan terkait Beban Barang dan Jasa diuraikan sebagai berikut.

- a. Secara umum, peningkatan Belanja Barang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kegiatan besar yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2025 dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Pelaksanaan kegiatan ini berdampak pada meningkatnya Beban

Keperluan Perkantoran, Beban Honor Output Kegiatan, dan Belanja Bahan.

- b. Beban Keperluan Perkantoran per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan 170,31 persen dibanding per 31 Desember 2024 disebabkan terdapat perubahan akun yang digunakan untuk mencatat pembayaran koneksi internet. Perubahan ini dilakukan dari menggunakan akun Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya pada tahun anggaran sebelumnya menjadi akun Belanja Keperluan Perkantoran.
- c. Beban Honor Operasional Satuan Kerja per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan 1,26 persen dibanding per 31 Desember 2024 disebabkan terdapat perubahan nilai honor Pengelola Anggaran, Pejabat Pengadaan, dan Pengelola SAI.
- d. Beban Barang Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan 100,00 persen dibanding per 31 Desember 2024 disebabkan tidak terdapat pengadaan seragam selama Tahun Anggaran 2025.
- e. Beban Bahan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan 136,65 persen dibanding per 31 Desember 2024 disebabkan meningkatnya keperluan perlengkapan pelatihan dan kegiatan statistik lainnya selama Tahun Anggaran 2025.
- f. Beban Honor Output Kegiatan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan 55,13 persen dibanding per 31 Desember 2024 disebabkan oleh meningkatnya jumlah kegiatan besar yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2025 dibandingkan Tahun Anggaran 2024.
- g. Beban Barang Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan 744,96 persen dibanding per 31 Desember 2024 disebabkan oleh adanya pembayaran asuransi Petugas Pemetaan Wilkerstat.
- h. Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan 876,90 persen dibanding per 31 Desember 2024 disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2025.
- i. Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan 19,01 persen dibanding per 31 Desember 2024 disebabkan oleh adanya Pengadaan Kanopi BPS Kota Bontang dengan BAST No. 089/PPK/BPS-BONTANG/2025 tanggal 14 Juli 2025 dan Pengadaan Rumah

Genset dengan BAST No. 178/PPK/BPS-BONTANG/2025 tanggal 2 Desember 2025.

10. Beban Langganan Listrik per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 15,09 persen dibanding per 31 Desember 2024 disebabkan meningkatnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan dan mempengaruhi konsumsi listrik selama Tahun Anggaran 2025.
11. Beban Langganan Telepon mengalami peningkatan sebesar 6,65 persen per 31 Desember 2025 dibandingkan per 31 Desember 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan telepon kantor BPS Kota Bontang.
12. Beban Langganan Air per 31 Desember 2025 mengalami penurunan 17,33 persen dibanding per 31 Desember 2024 disebabkan menurunnya penggunaan air di Kantor BPS Kota Bontang hingga per 31 Desember 2025.
13. Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan 90,39 persen dibanding per 31 Desember 2024 disebabkan adanya perubahan akun yang digunakan untuk mencatat pembayaran koneksi internet. Perubahan ini dilakukan dari menggunakan akun Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 menjadi akun Belanja Keperluan Perkantoran di Tahun Anggaran 2025.
14. Beban Jasa Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan 6,24 persen dibanding per 31 Desember 2024 disebabkan oleh berkurangnya biaya jasa manajemen building kebersihan dan keamanan akibat bertambahnya jumlah PPPK Operator Layanan Operasional di BPS Kota Bontang.

Tabel 25
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31 Desember 2025

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	78.901.315	79.187.643	(286.328)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	57.960.000	57.960.000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	0
Beban Bahan	79.783.450	79.783.450	0
Beban Honor Output Kegiatan	897.125.000	897.125.000	0

Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.719.824	3.719.824	0
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	16.705.000	16.705.000	0
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	29.706.000	29.706.000	0
Beban Langganan Listrik	59.169.703	45.061.500	14.108.203
Beban Langganan Telepon	429.025	429.025	0
Beban Langganan Air	2.041.125	2.122.125	(81.000)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.233.430	3.233.430	0
Beban Jasa Lainnya	310.359.173	310.359.173	0
Jumlah	1.539.133.045	1.525.392.170	13.740.875

Berikut merupakan rincian penyebab selisih nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025:

- a. Selisih LO dan LRA Beban Keperluan Perkantoran sebesar (Rp286.328) disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut.
 - Selisih sisa langganan *Web Domain* per 31 Desember 2024 senilai Rp70.224. dengan sisa langganan *Web Domain* per 31 Desember 2025 senilai (Rp107.265);
 - Selisih sisa langganan *Zoom Workplace Pro Annual* per 31 Desember 2024 senilai Rp641.762. dengan sisa langganan *Zoom Workplace Pro Annual* per 31 Desember 2025 senilai (Rp684.576);
 - Nilai sisa langganan *Canva Pro* per 31 Desember 2025 selama 98 hari hingga 8 April 2026 senilai (Rp206.473).
- b. Selisih LO dan LRA Beban Langganan Listrik sebesar Rp14.108.203 disebabkan oleh:
 - Penggunaan BDDM sisa token listrik per 31 Desember 2024 senilai Rp11.667.577;
 - Biaya langganan listrik pascabayar bulan Desember 2025 yang akan dibayarkan di bulan Januari 2026 sebesar Rp 2.440.626.
- c. Selisih LO dan LRA Beban Langganan Air sebesar (Rp81.000) disebabkan selisih biaya langganan air bulan Desember 2024 yang dibayarkan di bulan Januari 2025 sebesar (Rp224.625) dengan biaya langganan air bulan Desember 2025 yang dibayarkan di bulan Januari 2026 sebesar Rp143.625.

Beban
Pemeliharaan
Rp227.152.708

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp227.152.708 dan Rp71.101.972. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 26
Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158.362.000	25.275.000	526,56
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.625.351	38.996.053	65,72
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.165.357	6.830.919	(39,02)
Jumlah	227.152.708	71.101.972	219,47

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 219,47 persen yang disumbang dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dan Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan. Peningkatan ini disebabkan adanya perbaikan besar yang dilakukan terhadap gedung, halaman, serta peralatan dan mesin yang ada di BPS Kota Bontang. Selama Tahun Anggaran 2025 terdapat perbaikan plafon ruang rapat, perbaikan dinding PST, perbaikan pipa dan keran air, penggantian daya listrik dan meteran, pemeliharaan AC, pemeliharaan halaman kantor, serta pemeliharaan mobil operasional kantor.

Tabel 27
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2025

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158.362.000	158.362.000	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.625.351	64.625.351	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.165.357	0	4.165.357
Jumlah	227.152.708	222.987.351	4.165.357

Beban pemeliharaan senilai Rp4.165.357 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun Beban bahan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

Pemakaian persediaan untuk pemeliharaan tidak menimbulkan beban persediaan bahan untuk pemeliharaan karena pencatatan kode barang dalam aplikasi persediaan menggunakan kode barang bahan pemeliharaan tetapi realisasi anggaran belanjanya menggunakan akun belanja persediaan barang konsumsi, bukan belanja pemeliharaan.

Beban Perjalanan Dinas
Rp428.098.849

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp428.098.849 dan Rp472.120.732. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 28
Rincian Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	248.297.049	298.993.132	(16,96)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.968.000	15.990.000	24,88
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	159.833.800	151.206.000	5,71
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	5.931.600	(100,00)
Jumlah	428.098.849	472.120.732	(9,32)

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 9,32 persen. Penurunan ini disumbang oleh Beban Perjalanan Biasa dan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota. Penurunan Beban Perjalanan Biasa disebabkan karena menurunnya jumlah konsultasi yang dilakukan oleh pegawai BPS Kota Bontang ke BPS Provinsi Kalimantan Timur maupun ke KPPN Samarinda. Sedangkan, menurunnya Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota disebabkan menurunnya kebutuhan paket *meeting* luar kota selama Tahun Anggaran 2025.

Tabel 29
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai 31 Desember 2025

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	248.297.049	248.297.049	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.968.000	19.968.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	159.833.800	159.833.800	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Jumlah	428.098.849	428.098.849	0

Per 31 Desember 2025, tidak terdapat selisih nilai LO dan LRA beban perjalanan dinas.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp288.609.786

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp288.609.786 dan Rp316.445.363. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 30
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	230.496.486	258.332.063	(10,78)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	58.113.300	58.113.300	0,00
Jumlah	288.609.786	316.445.363	(8,80)

Beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 8,80 persen. Perubahan ini disumbangkan oleh menurunnya beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar 10,78 persen. Sedangkan, beban penyusutan gedung dan bangunan stagnan nilainya dibandingkan dengan periode yang sama di tahun anggaran yang lalu.

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp46.763.007

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2025 dan
31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik(Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	38.434.000	0	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8.329.007	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1.280.000	(100,00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah	46.763.007	1.280.000	3.553,36

Beberapa penjelasan terkait Pos Kegiatan Non Operasional diuraikan sebagai berikut.

- a. Per 31 Desember 2025 terdapat Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berupa Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp38.434.000. Pendapatan ini diperoleh dari hasil lelang BMN BPS Kota Bontang sesuai Risalah Lelang Nomor 82/13.04/2025-01 tanggal 6 Oktober 2025. PNBPN tersebut disetor melalui SIMPONI dengan NTB Nomor 827842563758 dan NTPN Nomor 8C08155DFJ525I57 pada tanggal 13 Oktober 2025 sebesar Rp38.434.000.
- b. Per 31 Desember 2025 terdapat Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp8.329.007 yang diperoleh dari:

- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian kelebihan pembayaran belanja honor KPA TA 2024 sebesar Rp5.283.600 pada tanggal 2 Mei 2025 dengan NTB 903136072106 dan NTPN 5BD1848VVO3F521I.
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang Manajemen Building TA 2024 sebesar Rp3.002.450 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 Badan Pemeriksa Keuangan. Pengembalian dilakukan pada tanggal 14 April 2025 dengan NTB 910973091109 dan NTPN 99DE47QLV2AC7SBO.
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian dobel bayar tagihan telekomunikasi bulan Oktober 2024 sebesar Rp42.957 pada tanggal 18 Februari 2025 dengan NTB 282145253710 dan NTPN 6918B0NA0DH8NR34
- c. Per 31 Desember 2025 tidak terdapat Beban Pelepasan Aset Non Lancar, Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan, maupun Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp4.736.833.782

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.736.833.782 dan Rp4.972.554.364.

Nilai Ekuitas Awal tersebut mengalami penurunan pada 1 Januari 2025 apabila dibandingkan dengan 1 Januari 2024.

Defisit LO
Rp5.756.736.436

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.756.736.436 dan Rp5.192.434.366. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp598.772 dan Rp0. Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024(Rp)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	598.772	0
Jumlah	598.772	0

Per 31 Desember 2025 terdapat Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp598.772. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan penyesuaian nilai aset tetap yang dilakukan akibat koreksi kesalahan pencatatan, hasil inventarisasi, atau penyesuaian kebijakan akuntansi, yang tidak berasal dari revaluasi aset dan tidak memengaruhi kinerja operasional periode berjalan, sehingga dicatat langsung pada ekuitas.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp598.772*

E.3.1 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp598.772 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Tabel 33
Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025*

Tabel Jenis Aset Tetap	Tabel Nilai Koreksi (Rp)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp598.772
Jumlah	Rp598.772

*) nilai minus pada tabel didefinisikan koreksi pada aset tersebut merupakan koreksi pengurangan

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp598.772 bersifat menambah ekuitas BPS Kota Bontang. Nilai ini diperoleh dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin selama Tahun Anggaran 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp1.721.952 dilakukan sebagai tindak lanjut hasil audit BPK tahun 2023 dan ditetapkan melalui Surat Keterangan Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kota Bontang Selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor B-261/6474/PL.610/2025 tentang Perbaikan (Koreksi) Pembukuan Barang Milik Negara Pada Kantor Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 tanggal 24 Oktober 2025.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp5.694.445.537*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.694.445.537 dan Rp4.956.713.784. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Tabel 34
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Jenis	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024(Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.686.813.761	4.892.697.247

Diterima dari Entitas Lain	(51.897.123)	(1.921.652)
Transfer Masuk	59.528.899	65.938.189
Jumlah	5.694.445.537	4.956.713.784

Beberapa penjelasan terkait Nilai Transaksi antar Entitas diuraikan sebagai berikut.

- a. Transaksi yang ditagihkan ke entitas lain senilai Rp5.686.813.761 merupakan realisasi anggaran yang diajukan ke KPPN Samarinda s.d. 31 Desember 2025.
- b. Transaksi yang diterima dari entitas lain sebesar (Rp51.897.123) diperoleh dari:
 - Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN berupa Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi berupa sewa rumah dinas bulan Januari-Desember 2025 sebesar (Rp3.412.164);
 - Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp8.329.007);
 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp1.721.952);
 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan yang diperoleh dari hasil lelang BMN BPS Kota Bontang sesuai Risalah Lelang Nomor 82/13.04/2025-01 tanggal 6 Oktober 2025. PNBPN tersebut disetor melalui SIMPONI dengan NTB Nomor 827842563758 dan NTPN Nomor 8C08155DFJ525I57 pada tanggal 13 Oktober 2025 sebesar (Rp38.434.000).
- c. Transfer Masuk senilai Rp59.528.899 merupakan transfer masuk dari BPS Provinsi Kalimantan Timur berupa persediaan barang konsumsi senilai Rp45.456.899 dan aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp14.072.000.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar minus Rp51.897.123 sedangkan DKEL sebesar Rp5.686.813.761.

Tabel 34A
Rincian Diterima dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas Lain
per 31 Desember 2025

No	Uraian	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)(Rp)	Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)(Rp)
1	Pendapatan Negara Bukan Pajak - LRA	51.897.123	0
Jumlah		51.897.123	0
2	Belanja - LRA		
	Belanja Pegawai	0	3.194.685.669
	Belanja Barang	0	2.216.531.445
	Belanja Modal	0	275.596.647
Jumlah		51.897.123	5.686.813.761

Nilai Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) sebesar (Rp51.897.123) diperoleh dari Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN berupa Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi berupa sewa rumah dinas bulan Januari-Desember 2025 sebesar (Rp3.412.164) dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp8.329.007), Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp1.721.952), dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan yang diperoleh dari hasil lelang BMN BPS Kota Bontang sesuai Risalah Lelang Nomor 82/13.04/2025-01 tanggal 6 Oktober 2025. PNBPN tersebut disetor melalui SIMPONI dengan NTB Nomor 827842563758 dan NTPN Nomor 8C08155DFJ525157 pada tanggal 13 Oktober 2025 sebesar (Rp38.434.000).

Nilai Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp5.686.813.761 berasal dari realisasi belanja netto hingga 31 Desember 2025 dengan rincian realisasi Belanja Pegawai netto sebesar Rp3.194.685.669, realisasi Belanja Barang netto Rp2.216.531.445, dan realisasi Belanja Modal netto sebesar Rp275.596.647.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp59.528.899. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

Per 31 Desember 2025 terdapat Transfer Masuk sebesar Rp59.528.899 dari BPS Provinsi Kalimantan Timur berupa Barang Konsumsi senilai Rp45.456.899 dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai

Rp14.072.000. Rincian transfer masuk per 31 Desember 2025 dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 35
Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2025

Entitas Asal	Jenis	Aset Diterima	Akumulasi Transaksional	Nilai Buku Aset (Rp)
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei Industri, Pengolahan, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi (IPEK) 2025	384.807	384.807
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen SERUTI Triwulan 2 2025	1.748.805	1.748.805
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Sakernas Agustus 2025	4.015.992	4.015.992
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Susenas September 2025	5.952.962	5.952.962
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Seruti INTI	898.704	898.704
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei IMK Tahunan 2025	163.170	163.170
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Seruti INTI dan MAK	2.587.336	2.587.336
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Persediaan ATK MBG	2.987.400	2.987.400
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei Harga Produsen	3.410.142	3.410.142
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Susenas Maret dan Seruti 2026	23.307.581	23.307.581
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Peralatan dan Mesin	Alat Ubinan Alat Bantu Uji Tumbuh	14.072.000	14.072.000
Jumlah			Rp59.528.899	Rp59.528.899

Ekuitas Akhir
Rp4.675.141.655

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.675.141.655 dan Rp4.736.833.782.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Penjelasan Pengelola Anggaran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 001/64741/2025 Tentang Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 tanggal 2 Januari 2025, pengelola keuangan Badan Pusat Statistik Kota Bontang TA 2024 adalah sebagai berikut.

Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Nur Wahid, M.M.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Novana Ari Santi, SST.
Pejabat Penandatanganan SPM	: Octarina Nuria Salsabila, S.Tr.Stat.
Bendahara	: Ilmiah Sukanthi, SE.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 006/64741/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor SK 001/64741/2025 Tentang Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 tanggal 3 Februari 2025, ditetapkan penggantian Pejabat Pembuat Komitmen. Per 3 Februari 2025 pengelola keuangan Badan Pusat Statistik Kota Bontang TA 2025 adalah sebagai berikut.

Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Nur Wahid, M.M.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Della Nabiela, S.Tr.Stat.
Pejabat Penandatanganan SPM	: Octarina Nuria Salsabila, S.Tr.Stat.
Bendahara	: Ilmiah Sukanthi, SE.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 008/64741/2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor SK 001/64741/2025 Tentang Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 tanggal 1 Oktober 2025, ditetapkan penggantian Pejabat Penandatanganan SPM. Per 1 Oktober 2025 pengelola keuangan Badan Pusat Statistik Kota Bontang TA 2025 adalah sebagai berikut.

Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Nur Wahid, M.M.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Della Nabiela, S.Tr.Stat.
Pejabat Penandatanganan SPM	: Nabila Widiastuti, S.Tr.Stat.
Bendahara	: Ilmiah Sukanthi, SE.

F.2 Penjelasan Pengurus BMN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 004/64741/2025 Tentang Penunjukan Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 tanggal 2 Januari 2025, pengurus/penyimpan BMN Badan Pusat Statistik Kota Bontang TA 2025 adalah sebagai berikut.

Pengurus/ Penyimpan BMN	: Ananda Trinita Nurazizah, A.Md.Stat.
-------------------------	--

F.3 Penjelasan Pejabat Pengadaan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 003/64741/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 tanggal 2 Januari 2025, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pusat Statistik Kota Bontang TA 2025 adalah sebagai berikut.

Pengurus/ Penyimpan BMN : Rivaldo Mubarak, S.Tr.Stat.

F.4 Penjelasan Rekening Bendahara Pengeluaran

BPS Kota Bontang memiliki Rekening Bendahara Pengeluaran BPG 046 BPS KOTA BONTANG di PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk dengan nomor rekening 8100186372371000 berdasarkan persetujuan rekening dari KPPN Samarinda No. S-181/KPN.1202/2025 tanggal 16 Januari 2025.

F.5 Penjelasan Pengungkapan Lainnya

Berikut merupakan rincian pengungkapan lainnya di BPS Kota Bontang hingga 31 Desember Tahun Anggaran 2025:

- BPS Kota Bontang tidak memiliki kerjasama dengan pihak lain;
- BPS Kota Bontang tidak memiliki rekening bendahara penerimaan;
- Tidak terdapat rincian uang muka belanja dan pendapatan yang masih harus diterima;
- Tidak terdapat rincian mengenai jalan, irigasi, dan jaringan;
- Tidak terdapat rincian mengenai konstruksi dalam pengerjaan;
- Tidak terdapat rincian mengenai pendapatan yang ditangguhkan;
- Tidak terdapat rincian mengenai pendapatan diterima di muka;
- Tidak terdapat rincian mengenai belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat;
- Tidak memiliki pos luar biasa;
- Tidak terdapat penyesuaian nilai tahun berjalan;
- Tidak terdapat koreksi atas beban;
- Tidak terdapat koreksi atas pendapatan;
- Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca

F.6 Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ditemukan adanya personel tenaga *outsourcing* BPS Kota Bontang yang tidak mendapatkan perlindungan aktif dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan karena keterlambatan pendaftaran kepesertaan oleh Penyedia Jasa. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan pengembalian ke negara sebesar Rp3.002.450 atas kelebihan bayar, dengan rincian kelebihan pembayaran

tahun 2023 sebesar Rp1.506.480 dan kelebihan pembayaran tahun 2024 sebesar Rp1.495.970.

Berkaitan dengan hasil pemeriksaan ini, dilakukan tindak lanjut berupa pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang Manajemen Building TA 2024 sebesar Rp3.002.450 pada tanggal 14 April 2025 dengan NTB 910973091109 dan NTPN 99DE47QLV2AC7SBO dan termasuk dalam Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Selain itu, dilakukan Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp1.721.952 sebagai tindak lanjut hasil audit BPK tahun 2023 dan ditetapkan melalui Surat Keterangan Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kota Bontang Selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor B-261/6474/PL.610/2025 tentang Perbaikan (Koreksi) Pembukuan Barang Milik Negara Pada Kantor Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 tanggal 24 Oktober 2025.

F.7 Lelang BMN Tahun Anggaran 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, BPS Kota Bontang melakukan lelang BMN Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan berupa 10 (sepuluh) unit sepeda motor dengan kondisi rusak berat. Lelang ini tercatat dalam Risalah Lelang Nomor 82/13.04/2025-01 tanggal 6 Oktober 2025. Hasil bersih lelang tersebut kemudian disetor melalui SIMPONI dengan NTB Nomor 827842563758 dan NTPN Nomor 8C08155DFJ525I57 pada tanggal 13 Oktober 2025 sebesar Rp38.434.000.

No	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Merk/Tipe	Jumlah	Tahun Perolehan/ Tahun Pembuatan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3020104001	5	Sepeda Motor	Honda, GL 160 D	1 Unit	2009/2009
2	3020104001	6	Sepeda Motor	Honda, NF 125 TD	1 Unit	2010/2010
3	3020104001	7	Sepeda Motor	HONDA/SUPRA X 125 TD, NF 125 TD	1 Unit	2011/2011
4	3020104001	8	Sepeda Motor	HONDA/SUPRA X 125 TD, NF125TD	1 Unit	2011/2011
5	3020104001	9	Sepeda Motor	NEW MEGA PRO SP, GL15A1D	1 Unit	2011/2011
6	3020104001	10	Sepeda Motor	Honda VERSA CW, Honda VERSA CW	1 Unit	2013/2013
7	3020104001	11	Sepeda Motor	Honda Supra X 125, NF12A1CF2 M/T	1 Unit	2013/2013
8	3020104001	12	Sepeda Motor	Honda Supra X 125, NF12A1CF2 M/T	1 Unit	2013/2013
9	3020104001	13	Sepeda Motor	Honda Supra X 125, NF12A1CF2 M/T	1 Unit	2013/2013
10	3020104001	14	Sepeda Motor	SUPRA X 125 FI CW, AFX12U21C08 M/T	1 Unit	2015/2014

F.8 Pengungkapan Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2025, pada Badan Pusat Statistik terdapat terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional (07) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional 7 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 (satu) program prioritas yaitu Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan, yang dilaksanakan di Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Kota Bontang dengan pagu mencapai Rp22.100.000 dan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.013.626 (63,41%) dengan rincian sebagai berikut.

Nama Satker	Program/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
BPS Kota Bontang	Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	22.100.000	14.013.626	63,41	Lembaga	1	1	100,00

F.9 Pengungkapan Anggaran Tematik

Per 31 Desember 2025, di BPS Kota Bontang terdapat 1 (satu) RO yang memiliki penanda tematik APBN dengan Tema 03 yaitu Anggaran Responsif Gender (ARG). Pengungkapan ini dirinci sebagai berikut.

a. Anggaran Responsif Gender (ARG) (03)

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 RO yang dilaksanakan di Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Kota Bontang dengan pagu mencapai Rp1.490.000 dan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp0 (0,00%) dengan rincian sebagai berikut.

Nama Satker	RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%	Keterkaitan dengan PN
BPS Kota Bontang	Publikasi/ laporan analisis dan pengembangan statistik	1.490.000	0	0,00	Layanan	1	1	100,00	Bukan Program Prioritas

F.10 Penjelasan Capaian Output

Per 31 Desember 2025, output strategis yang telah dicapai oleh BPS Kota Bontang dirinci sebagai berikut.

No	Kode Rincian Output	Uraian Rincian Output	PN/ Tematik (PN xx / T xx)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output (%)
1	004	Publikasi/Laporan Analisis Dan Pengembangan Statistik	T 03	1.490.000	0	0	1 Layanan	1 Layanan	100,00
2	004	Laporan Diseminasi Dan Metadata Statistik	-	24.024.000	20.135.038	83,81	3 Layanan	3 Layanan	100,00
3	007	Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran	-	26.231.000	26.094.481	99,48	7 Layanan	7 Layanan	100,00
4	006	Publikasi/Laporan Neraca Produksi	-	45.782.000	23.581.125	51,51	6 Layanan	6 Layanan	100,00
5	005	Dokumen/Laporan Pengembangan Metodologi Kegiatan Statistik	-	2.906.000	0	0,00	2 Layanan	2 Layanan	100,00
6	004	Publikasi/Laporan Statistik Distribusi	-	18.642.000	14.801.750	79,40	4 Layanan	4 Layanan	100,00
7	006	Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi	-	235.631.000	234.463.681	99,50	3 Layanan	3 Layanan	100,00
8	009	Publikasi/Laporan Statistik Harga	-	134.857.000	134.837.661	99,99	5 Layanan	5 Layanan	100,00
9	006	Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan Dan Penggalian, Energi, Dan Konstruksi	-	90.557.000	90.535.500	99,98	7 Layanan	7 Layanan	100,00
10	004	Publikasi/Laporan Survei Angkatan Kerja Nasional	-	127.961.000	127.118.976	99,34	4 Layanan	4 Layanan	100,00
11	006	Publikasi/Laporan Survei Penduduk Antar Sensus	-	133.237.000	133.232.900	100,00	1 Layanan	1 Layanan	100,00
12	003	Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat	-	1.200.000	0	0,00	1 Layanan	1 Layanan	100,00
13	006	Publikasi/Laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional	-	357.259.000	357.069.196	99,95	6 Layanan	6 Layanan	100,00
14	006	Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	-	10.960.000	9.294.000	84,80	2 Layanan	2 Layanan	100,00

No	Kode Rincian Output	Uraian Rincian Output	PN/ Tematik (PN xx / T xx)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output (%)
15	008	Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa	-	19.224.000	15.558.700	80,93	1 Layanan	1 Layanan	100,00
16	004	Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, Dan Pariwisata	-	94.291.000	82.544.364	87,54	3 Layanan	3 Layanan	100,00
17	009	Publikasi/Laporan Statistik E-Commerce	-	41.995.000	32.971.000	78,51	1 Layanan	1 Layanan	100,00
18	005	Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan	-	43.530.000	42.902.375	98,56	3 Layanan	3 Layanan	100,00
19	007	Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan	-	50.345.000	50.186.700	99,69	2 Layanan	2 Layanan	100,00
20	008	Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura Dan Perkebunan	-	8.116.000	7.073.450	87,15	2 Layanan	2 Layanan	100,00
21	004	Pengembangan Infrastruktur Dan Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	-	41.450.000	23.230.080	56,04	1 Layanan	1 Layanan	100,00
22	003	Pembinaan Statistik Sektoral	PN 07	22.100.000	14.013.626	63,41	1 Layanan	1 Layanan	100,00
23	956	Layanan BMN	-	4.000	0	0,00	1 Layanan	1 Layanan	100,00
24	962	Layanan Umum	-	6.286.000	6.262.500	99,63	1 Layanan	1 Layanan	100,00
25	994	Layanan Perkantoran	-	4.018.858.000	3.978.767.890	99,00	2 Layanan	2 Layanan	100,00
26	951	Layanan Sarana Internal	-	256.040.000	255.599.997	99,83	2 Layanan	2 Layanan	100,00
27	955	Layanan Manajemen Keuangan	-	6.926.000	6.840.000	98,76	3 Layanan	3 Layanan	100,00

F.11 Penjelasan Capaian Rincian Output Menurut Klasifikasi Fungsi

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Badan Pusat Statistik Kota Bontang per 31 Desember 2025 antara lain sebagai berikut:

INFORMASI KINERJA BPS KOTA BONTANG PER 31 DESEMBER 2025 TAHUN ANGGARAN 2025

Kementrian/Lembaga : (054) Badan Pusat Statistik
 Unit Organisasi : (01) Badan Pusat Statistik
 Satuan Kerja : (637237) Badan Pusat Statistik Kota Bontang
 Fungsi : (01) Pelayanan Umum
 Sub Fungsi : (01.01) Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri
 Program : (GG) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
 Lokasi : Kota Bontang

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2896	Pengembangan dan Analisis Statistik								
	• Publikasi/laporan analisis dan pengembangan statistik	1.490.000	0	0	1	1	Layanan	100,00	kegiatan sudah selesai
2897	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik								
	• Laporan diseminasi dan metadata statistik	24.024.000	20.135.038	83,81	3	3	Layanan	100,00	kegiatan sudah selesai
	• Penguatan penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral	22.100.000	14.013.626	63,41	1	1	Lembaga	100,00	kegiatan sudah selesai
2898	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran								
	• Publikasi/laporan statistik neraca pengeluaran	26.231.000	26.094.481	99,48	7	7	Layanan	100,00	kegiatan sudah selesai
2899	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi								
	• Publikasi/laporan neraca produksi	45.782.000	23.581.125	51,51	6	6	Layanan	100,00	Kegiatan sudah selesai
2900	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei								
	• Dokumen/laporan pengembangan	2.906.000	0	0,00	2	2	Layanan	100,00	Kegiatan sudah selesai

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	metodologi kegiatan statistik								
2901	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei								
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi 	41.450.000	23.230.080	56,04	1	1	Unit	100,00	Kegiatan sudah selesai
2902	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi								
	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi/laporan statistik distribusi 	18.642.000	14.801.750	79,40	4	4	Layanan	100,00	kegiatan sudah selesai
	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi/laporan sensus ekonomi 	235.631.000	234.463.681	99,50	3	3	Layanan	100,00	kegiatan sudah selesai
2903	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga								
	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi/laporan statistik harga 	134.857.000	134.837.661	99,99	5	5	Layanan	100,00	kegiatan sudah selesai
2904	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi								
	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi/laporan statistik industri, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi 	90.557.000	90.535.500	99,98	7	7	Layanan	100,00	Kegiatan sudah selesai
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan								
	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi/laporan sakernas 	127.961.000	127.118.976	99,34	4	4	Dokumen	100,00	kegiatan sudah selesai
	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi/laporan survei penduduk antar sensus 	133.237.000	133.232.900	100,00	1	1	Dokumen	100,00	kegiatan sudah selesai
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat								
	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi/laporan statistik kesejahteraan rakyat 	1.200.000	0	0,00	1	1	Layanan	100,00	kegiatan sudah selesai
	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi/laporan susenas 	357.259.000	357.069.196	99,95	6	6	Dokumen	100,00	kegiatan sudah selesai
2907	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial								

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	• Publikasi/laporan statistik ketahanan sosial	10.960.000	9.294.000	84,80	2	2	Layanan	100,00	kegiatan sudah selesai
	• Publikasi/laporan pendataan podes	19.224.000	15.558.700	80,93	1	1	Dokumen	100,00	kegiatan sudah selesai
2908	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata								
	• Publikasi/laporan statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata	94.291.000	82.544.364	87,54	3	3	Layanan	100,00	kegiatan sudah selesai
	• Publikasi/laporan statistik e-commerce	41.995.000	32.971.000	78,51	1	1	Layanan	100,00	kegiatan sudah selesai
2909	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan								
	• Publikasi/laporan statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan	43.530.000	42.902.375	98,56	3	3	Layanan	100,00	kegiatan sudah selesai
2910	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								
	• Publikasi/ laporan statistik tanaman pangan	50.345.000	50.186.700	99,69	2	2	Layanan	100,00	Kegiatan sudah selesai
	• Publikasi/laporan statistik hortikultura dan perkebunan	8.116.000	7.073.450	87,15	2	2	Layanan	100,00	Kegiatan sudah selesai

Kementerian/Lembaga : (054) Badan Pusat Statistik
 Unit Organisasi : (01) Badan Pusat Statistik
 Satuan Kerja : (637237) Badan Pusat Statistik Kota Bontang
 Fungsi : (01) Pelayanan Umum
 Sub Fungsi : (01.01) Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

 Program : (WA) Program Dukungan Manajemen
 Lokasi : Kota Bontang

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2886	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi								
	• Layanan BMN	4.000	-	0,00	1	1	Layanan	100,00	Kegiatan sudah selesai
	• Layanan umum	6.286.000	6.262.500	99,63	1	1	Layanan	100,00	Kegiatan sudah selesai
	• Layanan perkantoran	4.018.858.000	3.978.767.890	99,00	2	2	Layanan	100,00	Kegiatan sudah selesai
	• Layanan sarana internal	256.040.000	255.599.997	99,83	2	2	Paket	100,00	Kegiatan sudah selesai
	• Layanan manajemen keuangan	6.926.000	6.840.000	98,76	3	3	Dokumen	100,00	kegiatan sudah selesai

F.12 Penjelasan Historis Revisi DIPA

DIPA Awal BPS Kota Bontang dengan Nomor: SP DIPA- 054.01.2.637237/2025 tanggal 2 Desember 2025 dengan nomor Digital Stamp (DS): 1426-4569-9116-9220 dengan total nilai pagu anggaran Rp5.909.513.000 (lima miliar sembilan ratus sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah). Per 31 Desember 2025, BPS Kota Bontang telah melakukan 10 (sepuluh) kali revisi anggaran sebagai berikut:

- a. Revisi ke-1 dilakukan dalam rangka Efisiensi Anggaran BPS TA. 2025 sesuai Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-76/02000/PR.400/2025 tanggal 4 Februari 2025 menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan No:S-37/MK.02/2025 Tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH	BLOKIR
2896.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	2.000.000	2.000.000	0	1.490.000
2897.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	24.880.000	4.890.000	- 19.990.000	3.870.000
2897.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	22.100.000	22.100.000	0	21.250.000
2898.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	58.295.000	58.295.000	0	42.219.000
2899.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	43.193.000	43.193.000	0	30.031.000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	3.416.000	3.416.000	0	2.906.000
2901.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000
2902.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	345.573.000	345.573.000	0	343.071.000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	197.949.000	197.949.000	0	57.964.000
2904.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	105.170.000	105.170.000	0	36.748.000
2905.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	448.283.000	448.283.000	0	336.157.000
2906.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	478.689.000	478.689.000	0	212.636.000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	15.787.000	15.787.000	0	5.473.000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	89.011.000	89.011.000	0	84.541.000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	10.222.000	10.222.000	0	9.406.000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	37.301.000	43.465.000	6.164.000	5.090.000
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	3.999.046.000	3.999.046.000	0	79.025.000
2886.EBD.955	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]	10.598.000	10.598.000	0	3.672.000
Total		5.486.657.000	5.486.657.000	- 13.826.000	1.293.549.000

- b. Revisi ke-2 dilakukan dalam rangka revisi DIPA Triwulan I TA 2025 sesuai Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-115/02000/PR.440/2025 tanggal 27 Februari 2025.

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH	BLOKIR
2896.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	2.000.000	2.000.000	0	1.490.000
2897.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	4.890.000	4.890.000	0	3.870.000
2897.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	22.100.000	22.100.000	0	8.050.000
2898.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	58.295.000	58.295.000	0	35.560.000
2899.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	43.193.000	43.193.000	0	20.182.000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	3.416.000	3.416.000	0	2.906.000
2901.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000
2902.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	345.573.000	345.573.000	0	333.369.000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	197.949.000	197.949.000	0	45.424.000
2904.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	105.170.000	105.170.000	0	35.702.000
2905.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	448.283.000	448.283.000	0	338.480.000
2906.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	478.689.000	478.689.000	0	165.046.000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	15.787.000	15.787.000	0	4.933.000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	89.011.000	89.011.000	0	20.278.000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	10.222.000	10.222.000	0	623.000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	43.465.000	44.200.000	735.000	1.042.000
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	3.999.046.000	3.999.046.000	0	79.025.000
2886.EBD.955	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]	10.598.000	10.598.000	0	3.672.000
Total		5.895.687.000	5.896.422.000	735.000	1.117.652.000

c. Revisi ke-3 dilakukan dalam rangka Revisi Halaman III DIPA.

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH	BLOKIR
2896.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	2.000.000	2.000.000	0	1.490.000
2897.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	4.890.000	4.890.000	0	3.870.000
2897.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	22.100.000	22.100.000	0	8.050.000
2898.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	58.295.000	58.295.000	0	35.560.000
2899.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	43.193.000	43.193.000	0	20.182.000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	3.416.000	3.416.000	0	2.906.000
2901.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000
2902.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	345.573.000	345.573.000	0	333.369.000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	197.949.000	197.949.000	0	45.424.000
2904.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	105.170.000	105.170.000	0	35.702.000
2905.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	448.283.000	448.283.000	0	338.480.000
2906.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	478.689.000	478.689.000	0	165.046.000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	15.787.000	15.787.000	0	4.933.000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	89.011.000	89.011.000	0	20.278.000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	10.222.000	10.222.000	0	623.000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	43.465.000	44.200.000	735.000	1.042.000
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	3.999.046.000	3.999.046.000	0	79.025.000
2886.EBD.955	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]	10.598.000	10.598.000	0	3.672.000
Total		5.895.687.000	5.896.422.000	735.000	1.117.652.000

- d. Revisi ke-4 dilakukan dalam rangka Revisi DIPA Triwulan II TA 2025 sesuai Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-180/02000/PR.440/2025 tanggal 15 April 2025.

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH	BLOKIR
2896.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	2.000.000	2.000.000	0	1.490.000
2897.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	4.890.000	4.890.000	0	3.870.000
2897.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	22.100.000	22.100.000	0	8.050.000
2898.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	58.295.000	58.295.000	0	35.560.000
2899.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	43.193.000	43.193.000	0	22.181.000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	3.416.000	3.416.000	0	2.906.000
2901.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	18.000.000	21.450.000	3.450.000	18.000.000
2902.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	345.573.000	345.573.000	0	106.361.000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	197.949.000	197.949.000	0	45.424.000
2904.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	105.170.000	105.170.000	0	35.702.000
2905.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	448.283.000	448.283.000	0	178.432.000
2906.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	478.689.000	475.239.000	-3.450.000	86.393.000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	15.787.000	15.787.000	0	4.933.000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	89.011.000	94.011.000	5.000.000	20.352.000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	10.222.000	10.222.000	0	623.000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	44.200.000	44.200.000	0	1.042.000
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	3.999.046.000	3.999.046.000	0	79.025.000
2886.EBD.955	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]	10.598.000	10.598.000	0	3.672.000
Total		5.896.422.000	5.901.422.000	5.000.000	654.016.000

- e. Revisi ke-5 dilakukan dalam rangka Relaksasi Efisiensi Anggaran BPS TA 2025 sesuai Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-297/02000/PR.400/2025 tanggal 10 Juni 2025 perihal Tindak Lanjut Usulan Relaksasi Efisiensi Anggaran BPS TA 2025 Melalui Aplikasi SAKTI serta surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-168/01000/PR.400/2025 dan B-243/01000/PR.400/2025 terkait dengan usulan relaksasi efisiensi anggaran BPS TA 2025 kepada Menteri Keuangan.

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH	BLOKIR
2896.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	2.000.000	2.000.000	0	1.490.000
2897.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	4.890.000	4.890.000	0	3.870.000
2897.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	22.100.000	22.100.000	0	8.050.000
2898.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	58.295.000	58.295.000	0	35.560.000
2899.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	43.193.000	43.193.000	0	22.181.000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	3.416.000	3.416.000	0	2.906.000
2901.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	21.450.000	41.450.000	20.000.000	18.000.000
2902.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	345.573.000	243.046.000	-102.527.000	3.834.000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	197.949.000	197.949.000	0	45.424.000
2904.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	105.170.000	129.670.000	24.500.000	35.702.000
2905.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	448.283.000	480.297.000	32.014.000	178.432.000
2906.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	475.239.000	475.239.000	0	86.393.000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	15.787.000	15.787.000	0	4.933.000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	94.011.000	132.379.000	38.368.000	20.352.000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	10.222.000	10.222.000	0	623.000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line]	44.200.000	48.445.000	4.245.000	1.042.000
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	3.999.046.000	4.153.525.000	154.479.000	0
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]		256.040.000	256.040.000	0
2886.EBD.955	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]	10.598.000	6.926.000	-3.672.000	0
Total		5.901.422.000	6.324.869.000	423.447.000	468.792.000

- f. Revisi ke-6 dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan BPS tahun 2025 sesuai Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-302/02100/PR.440/2025 tanggal 2 Juli 2025 perihal Revisi DIPA Triwulan III TA 2025

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH	BLOKIR
2896.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	2.000.000	1.490.000	-510.000	1.490.000
2897.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	4.890.000	21.142.000	16.252.000	3.870.000
2897.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	22.100.000	22.100.000	0	8.050.000
2898.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	58.295.000	24.442.000	-33.853.000	0
2899.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	43.193.000	46.907.000	3.714.000	22.181.000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	3.416.000	2.906.000	-510.000	2.906.000
2901.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	41.450.000	41.450.000	0	18.000.000
2902.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	243.046.000	245.296.000	2.250.000	3.834.000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	197.949.000	145.706.000	-52.243.000	0
2904.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	129.670.000	77.500.000	-52.170.000	0
2905.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	480.297.000	257.515.000	-	0
				222.782.000	
2906.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	475.239.000	357.828.000	-	1.200.000
				117.411.000	
2907.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	15.787.000	32.069.000	16.282.000	4.933.000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	132.379.000	134.566.000	2.187.000	20.352.000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	10.222.000	48.945.000	38.723.000	623.000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	48.445.000	51.424.000	2.979.000	1.042.000
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	4.153.525.000	4.058.803.000	-94.722.000	0
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	256.040.000	256.040.000	0	0
2886.EBD.955	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	6.926.000	6.926.000	0	0
Total		6.324.869.000	5.833.055.000	-	88.481.000
				491.814.000	

- g. Revisi ke-7 dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan BPS tahun 2025 sesuai Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-506/02000/PR.440/2025 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Revisi DIPA Agustus TA 2025

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH	BLOKIR
2896.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	1.490.000	1.490.000	0	1.490.000
2897.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	21.142.000	21.142.000	0	3.870.000
2897.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	22.100.000	22.100.000	0	8.050.000
2898.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	24.442.000	24.442.000	0	0
2899.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	46.907.000	46.907.000	0	22.181.000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	2.906.000	2.906.000	0	2.906.000
2901.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	41.450.000	41.450.000	0	18.000.000
2902.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	245.296.000	255.651.000	10.355.000	3.834.000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	145.706.000	145.706.000	0	0
2904.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	77.500.000	77.500.000	0	0
2905.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	257.515.000	257.515.000	0	0
2906.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	357.828.000	359.359.000	1.531.000	1.200.000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	32.069.000	32.069.000	0	4.933.000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	134.566.000	142.505.000	7.939.000	20.352.000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	48.945.000	49.851.000	906.000	623.000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	51.424.000	51.424.000	0	1.042.000
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	4.058.803.000	4.108.803.000	50.000.000	0
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	256.040.000	256.040.000	0	0
2886.EBD.955	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	6.926.000	6.926.000	0	0
Total		5.833.055.000	5.903.786.000	70.731.000	88.481.000

h. Revisi ke-8 dilakukan dalam rangka Revisi Halaman III DIPA

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH	BLOKIR
2896.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	1.490.000	1.490.000	0	1.490.000
2897.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	21.142.000	21.142.000	0	3.870.000
2897.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	22.100.000	22.100.000	0	8.050.000
2898.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	24.442.000	24.442.000	0	0
2899.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	46.907.000	46.907.000	0	22.181.000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	2.906.000	2.906.000	0	2.906.000
2901.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	41.450.000	41.450.000	0	18.000.000
2902.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	255.651.000	255.651.000	0	3.834.000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	145.706.000	145.706.000	0	0
2904.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	77.500.000	77.500.000	0	0
2905.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	257.515.000	257.515.000	0	0
2906.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	359.359.000	359.359.000	0	1.200.000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	32.069.000	32.069.000	0	4.933.000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	142.505.000	142.505.000	0	20.352.000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	49.851.000	49.851.000	0	623.000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	51.424.000	51.424.000	0	1.042.000
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	4.108.803.000	4.108.803.000	0	0
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	256.040.000	256.040.000	0	0
2886.EBD.955	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	6.926.000	6.926.000	0	0
Total		5.903.786.000	5.903.786.000	0	88.481.000

- i. Revisi ke-9 dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan BPS tahun 2025 sesuai Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-621/02000/PR.440/2025 tanggal 13 Oktober 2025 perihal Revisi DIPA Oktober TA 2025.

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH	BLOKIR
2896.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	1.490.000	1.490.000	0	1.490.000
2897.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	21.142.000	24.024.000	2.882.000	3.870.000
2897.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	22.100.000	22.100.000	0	8.050.000
2898.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	24.442.000	26.231.000	1.789.000	0
2899.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	46.907.000	45.782.000	-1.125.000	22.181.000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	2.906.000	2.906.000	0	2.906.000
2901.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	41.450.000	41.450.000	0	18.000.000
2902.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	255.651.000	254.273.000	-1.378.000	3.834.000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	145.706.000	134.857.000	-10.849.000	0
2904.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	77.500.000	90.557.000	13.057.000	0
2905.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	257.515.000	261.198.000	3.683.000	0
2906.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	359.359.000	358.459.000	-900.000	1.200.000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	32.069.000	30.184.000	-1.885.000	4.933.000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	142.505.000	136.286.000	-6.219.000	20.352.000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	49.851.000	43.530.000	-6.321.000	623.000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	51.424.000	58.461.000	7.037.000	1.042.000
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	4.108.803.000	4.025.148.000	-83.655.000	0
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	256.040.000	256.040.000	0	0
2886.EBD.955	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	6.926.000	6.926.000	0	0
Total		5.903.786.000	5.819.902.000	-83.884.000	88.481.000

j. Revisi ke-10 dilakukan dalam rangka Revisi Pemutakhiran Data POK.

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH	BLOKIR
2896.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	1.490.000	1.490.000	0	1.490.000
2897.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	24.024.000	24.024.000	0	3.870.000
2897.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	22.100.000	22.100.000	0	8.050.000
2898.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	26.231.000	26.231.000	0	0
2899.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	45.782.000	45.782.000	0	22.181.000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	2.906.000	2.906.000	0	2.906.000
2901.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	41.450.000	41.450.000	0	18.000.000
2902.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	254.273.000	254.273.000	0	3.834.000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	134.857.000	134.857.000	0	0
2904.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	90.557.000	90.557.000	0	0
2905.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	261.198.000	261.198.000	0	0
2906.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	358.459.000	358.459.000	0	1.200.000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	30.184.000	30.184.000	0	4.933.000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	136.286.000	136.286.000	0	20.352.000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	43.530.000	43.530.000	0	623.000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	58.461.000	58.461.000	0	1.042.000
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	4.025.148.000	4.025.148.000	0	0
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	256.040.000	256.040.000	0	0
2886.EBD.955	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	6.926.000	6.926.000	0	0
Total		5.903.786.000	5.819.902.000	0	88.481.000